



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
Jalan Diponegoro No. 87, Manado 95112
Telepon : (0431) 870359, Faksimile : (0431) 864288
Laman : www.sulut.kemenkumham.go.id

Nomor : W.25-PR.03-5584 5 Juli 2023
Sifat : Sangat segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Semester 1 Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
di- J a k a r t a

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester 1 Tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Demikian disampaikan, atas perkenaanannya diucapkan terima kasih



Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ronald Lumbuun
NIP. 197809062003121001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Semester I Tahun 2023



BerAKHLAK
Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**



**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan tuntunanNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara ini merupakan dokumen pertanggungjawaban dalam menjalankan program-program kegiatan sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban. LKjIP ini dibuat didasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, bahwa "setiap Pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)". LKjIP disusun secara sistematis dan terukur untuk memberikan informasi secara transparan dan akuntabel atas kinerja yang telah dicapai. Penyusunan LKjIP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara disusun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-01.PR.03 tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati oleh Kepala Kantor Wilayah dan Pimpinan Tinggi Pratama pada unit eselon I Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun 2023.

LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara memberikan gambaran yang komprehensif atas tercapainya target kinerja utama maupun kinerja lainnya dan berbagai prestasi pada periode Semester I Tahun 2023. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan segenap jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam capaian dan realisasi pada Perjanjian Kinerja untuk mendukung visi dan menjalankan misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada wilayah Sulawesi Utara.

LKjIP Kantor Wilayah tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta menjadi dasar untuk mewujudkan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Wilayah yang lebih baik dan lebih berkualitas di masa yang akan datang.



Kepala Kantor Wilayah
Sulawesi Utara



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ronald Lumbuun

NIP. 197809062003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	xi
Latar Belakang	xi
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	12
Maksud dan Tujuan	17
Aspek Strategis	17
Isu Strategis / Permasalahan	18
Sistematika Laporan	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
Rencana Strategis	20
Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
Capaian Kinerja Organisasi	29
Realisasi Anggaran	114
Capaian Kinerja Lainnya	115
E-Performance	115
SMART	115
E-Monev Bappenas	117
BAB IV PENUTUP	123
Kesimpulan	123
Saran	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah	15
Gambar 2 Unit Pelaksan Teknis Kantor Wilayah Sulawesi Utara.....	16
Gambar 3 Visi Misi Kemenkumham RI.....	20
Gambar 4 Tampilan Website E-Performance	115
Gambar 5 Tampilan Inputan EMonev Bappenas	117
Gambar 6 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas Setjen	118
Gambar 7 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas BPHN	118
Gambar 8 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas Pemasyarakatan	119
Gambar 9 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas PP.....	119
Gambar 10 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas HAM	120
Gambar 11 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas BPPHAM	121
Gambar 12 Tangkapan Layar E-Mmonev Imigrasi	121
Gambar 13 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas AHU.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah.....	27
Tabel 2 Target dan Realisasi Divisi Administrasi	30
Tabel 3 Hasil Survey pada Semester I	30
Tabel 4 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi tahun sebelumnya	31
Tabel 5 Target Jangka Menengah Divisi Administrasi pada Renstra Kantor Wilayah	31
Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pemasarakatan.....	33
Tabel 7 Variabel Kegiatan pada Divisi Pemasarakatan	34
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pemasarakatan	35
Tabel 9 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 1 Divisi Pemasarakatan.....	35
Tabel 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2	37
Tabel 11 Data tahanan <i>overstaying</i>	37
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2	38
Tabel 13 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 2	39
Tabel 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3	40
Tabel 15 Data Indikator Kinerja Kegiatan 3	40
Tabel 16 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3	41
Tabel 17 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 3	41
Tabel 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4	43
Tabel 19 Data Indikator Kinerja Kegiatan 4	43
Tabel 20 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4	43
Tabel 21 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 4	44
Tabel 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 5	46
Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 6	48
Tabel 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 6	48
Tabel 25 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 6	49
Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 7	50
Tabel 27 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 7	50
Tabel 28 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 7	51
Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 8	52
Tabel 30 Data Indikator Kinerja Kegiatan 8	52
Tabel 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 8	53
Tabel 32 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 8	53
Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 9	55
Tabel 34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10	56
Tabel 35 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10	56
Tabel 36 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 8	57
Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 11	58
Tabel 38 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 11	58
Tabel 39 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 11	59
Tabel 40 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 12	60
Tabel 41 Data Benda Sitaan dan Benda Rampasan	60
Tabel 42 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 11	61
Tabel 43 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 11	61
Tabel 44 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 13	63
Tabel 45 Data Benda Sitaan yang telah dieksekusi.....	63
Tabel 46 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 13	63
Tabel 47 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 13	64
Tabel 48 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 14	65
Tabel 49 Data Klien Usia Produktif	65
Tabel 50 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 14	65

Tabel 51 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 14.....	66
Tabel 52 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 15.....	67
Tabel 53 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 15.....	67
Tabel 54 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 15.....	68
Tabel 55 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 16.....	69
Tabel 56 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 16.....	69
Tabel 57 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 16.....	70
Tabel 58 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17.....	71
Tabel 59 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17.....	71
Tabel 60 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 17.....	72
Tabel 61 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 18.....	73
Tabel 62 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 18.....	73
Tabel 63 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 18.....	73
Tabel 64 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 19.....	75
Tabel 65 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 19.....	75
Tabel 66 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 19.....	75
Tabel 67 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 20.....	77
Tabel 68 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 20.....	77
Tabel 69 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 20.....	78
Tabel 70 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 21.....	79
Tabel 71 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Imigrasi.....	80
Tabel 72 Data Survey UPT Imigrasi.....	80
Tabel 73 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Imigrasi.....	81
Tabel 74 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja 1 pada Divisi Imigrasi.....	81
Tabel 75 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2.....	82
Tabel 76 Target dan Capaian Indikakor Kinerja Kegiatan 1 pada DIvisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	83
Tabel 77 Data Layanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah.....	83
Tabel 78 Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	84
Tabel 79 Target Jangka Menengah Indikator Klnerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	84
Tabel 80 Target dan Capaian Indikakor Kinerja Kegiatan 1 pada DIvisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	86
Tabel 81 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 2 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	86
Tabel 82 Target Jangka Menengah Indikator Klnerja Kegiatan 2 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.....	87
Tabel 83 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3.....	88
Tabel 84 Tabel Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 3.....	89
Tabel 85 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4.....	90
Tabel 86 Pelaksanaan kegiatan diseminasi.....	90
Tabel 87 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 4.....	90
Tabel 88 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 5.....	92
Tabel 89 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 5.....	92
Tabel 90 Target Jangka Menengah pada Indikator Kinerja Kegiatan 5.....	92
Tabel 91 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 6.....	94
Tabel 92 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 6.....	94
Tabel 93 Target Jangka Menengah pada Indikator Kinerja Kegiatan 6.....	95
Tabel 94 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 7.....	96
Tabel 95 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 8.....	97
Tabel 96 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 9.....	100
Tabel 97 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 9.....	100
Tabel 98 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10.....	102
Tabel 99 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10.....	102

Tabel 100 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 10.....	103
Tabel 101 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 11.....	104
Tabel 102 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 12.....	105
Tabel 103 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 13.....	106
Tabel 104 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 14.....	107
Tabel 105 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 15.....	108
Tabel 106 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 16.....	109
Tabel 107 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 17.....	110
Tabel 108 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 17.....	111
Tabel 109 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 18.....	112
Tabel 110 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 19.....	113
Tabel 111 Realisasi Anggaran sd 2 Juli 2023	114

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama tahun 2023. Dimana penyusunan LKjIP ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Laporan Kinerja nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini juga sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara.

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan kinerja ini dijelaskan capaian kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Tahun 2023 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif di bidangnya hukum dan hak asasi manusia. Dengan Total Anggaran sebesar Rp 26.048.721.000,- (Dua Puluh Enam Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melaksanakan 22 (Dua puluh dua) Sasaran Kegiatan dan 60 (Enam Puluh) Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Kepala Kantor Wilayah dan Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Eselon I.

Realisasi anggaran sampai dengan Semester I Tahun 2023 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah 16.231.390.478 atau 55,75% dari total pagu anggaran Tahun 2023 yang telah direvisi dari Rp 26.048.721.000,-, menjadi Rp 31.571.294.000,- (Tiga puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan

puluh empat ribu rupiah) dan total sisa anggaran yang bisa digunakan sebesar Rp 15.114.261.207,- (Lima Belas Milyar Seratus empat belas juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara selalu berusaha mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai sasaran kegiatannya. Capaian tersebut ditunjukkan melalui capaian masing-masing indikatornya. Ukuran indikator kinerja yang tercapai sampai dengan semester I pada tahun 2023 antara lain :

1. Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah
2. Indeks penyelenggaraan di Wilayah
3. Presentase menurunnya tahanan yang overstaying
4. Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
5. Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
6. Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
7. Presentase narapidana yang bekerja dan produktif
8. Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
9. Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
10. Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
11. Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya
12. Presentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat
13. Presentase anak yang memperoleh hak integrasi
14. Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar
15. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah
16. Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah
17. Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah
18. Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah
19. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Dari indikator-indikator tersebut, ada indikator kinerja (kegiatan) yang tercapai optimal dan ada juga yang belum tercapai secara maksimal, belum tercapainya indikator tersebut secara maksimal disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit dan segera khususnya terkait dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara;

2. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas dan kompetensi dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan;
3. Masih diperlukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana;

Atas kekurangan capaian kinerja dimaksud pada semester I Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara akan melakukan peningkatan sampai pada akhir Tahun 2023, antara lain dengan:

1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya (sesuai dengan yang telah direncanakan) dengan tetap berpegang pada akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta dengan tetap mentaati Protokol Kesehatan;
2. Pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan penataan organisasi dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk mewujudkan Visi Kementerian Hukum melalui pelayanan prima kepada masyarakat.

LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara merupakan unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah provinsi Sulawesi Utara, oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara memiliki fungsi sebagai pengordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Dengan kata lain Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara berperan dalam memberikan pembinaan dan dukungan administrasi UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara juga memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum, pelayanan dan penegakan hak asasi manusia serta pelaksanaan urusan administrasi umum. Peran penting ini harus bersinergi untuk mendukung dalam pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam kurun waktu tahun 2023. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, dan berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2022 yang dituangkan dalam suatu bentuk dokumen Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas : “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Fungsi :

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengeordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah .

Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara terdiri atas :

1. Divisi Administrasi

Divisi Administrasi melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi

menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.
- b. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi.
- d. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.
- e. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.
- f. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber dayamanusia di lingkungan Kantor Wilayah.
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

2. Divisi Pemasyarakatan

Divisi Pemasyarakatan Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan.
- d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- b. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.
- d. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

4. *Divisi Pelayanan Hukum dan HAM*

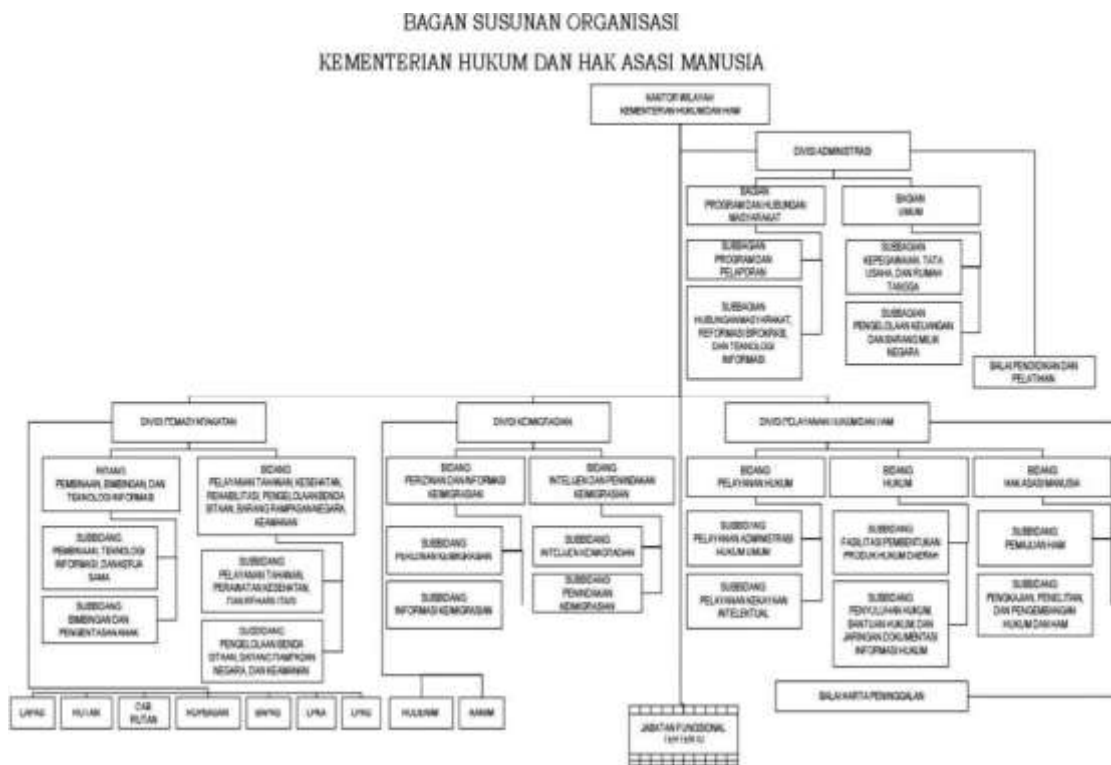
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di

lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- d. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Struktur organisasi Kantor Wilayah, sesuai dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat dilihat seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah

Jumlah Satuan Kerja

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian di wilayah Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 22 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, sebagai berikut:



Gambar 2 Unit Pelaksan Teknis Kantor Wilayah Sulawesi Utara

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP serta untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi mengenai realisasi target kinerja yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kinerja;
- b. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dalam pencapaian target sasaran pada periode semester I tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan akuntabel;
- c. Sebagai Bahan Evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun yang akan datang.

Aspek Strategis

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi Sulawesi Utara berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundangundangan. Kantor Wilayah Sulawesi Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Isu Strategis / Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara selama tahun 2023, terdapat beberapa kendala yang dialami antara lain:

1. Kurangnya SDM dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
2. Kebutuhan Anggaran yang belum memadai, Penyesuaian Kegiatan dan Revisi Anggaran;
3. Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Jajaran Kantor Wilayah belum memadai;
4. Kurangnya Perlengkapan Teknis pada Jajaran Divisi PAS dan Divisi Keimigrasian (Tingginya Potensi Gangguan Keamanan);
5. Permasalahan Undocumented Person di wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Perjanjian Border Crossing Agreement RI-Philipina Tahun 1975 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan UU No.6 / 2011;
7. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat belum memenuhi target dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait hal ini;
8. Keterbatasan dalam jumlah petugas yang ditetapkan sebagai wali Pemasyarakatan dan Asisten Wali Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah WBP;
9. Belum melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan bersertifikat karena adanya anggaran yang terblokir dan *direfocussing*;
10. Terbatasnya fasilitas penunjang untuk meningkatkan produktivitas Narapidana pada program dan kegiatan Kerja di masing-masing Lapas;
11. Kurangnya pemahaman dari pihak APH (Kepolisian/Kejaksaan) terkait pendekatan restoratif justice sehingga tidak dilakukan upaya Diversi;
12. Pemenuhan dokumen melalui internet terhambat pada inovasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
13. Over Kapasitas pada beberapa Lapas dan Rutan di Kota Manado; dan
14. Minimnya penerapan Manajemen Resiko pada Unit Pelaksana Teknis.

Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2023.

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, Tugas dan fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis / Permasalahan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Rencana Strategis, Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan tentang capaian kinerja, analisa, dan realisasi anggaran atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM RI telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI yang berisi tujuan, sasaran dan kebijakan, program, kegiatan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk periode lima tahun dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan untuk periode satu tahun. Rencana Strategis yang meliputi berbagai komponen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Visi dan Misi

Sebagai unit / satuan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menjalankan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai berikut:



Gambar 3 Visi Misi Kemenkumham RI

Tujuan

Tujuan Merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020- 2024, berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum, Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Terlindunginya hak asasi manusia.
5. Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten, Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.
6. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
7. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

Tata Nilai

Mendukung pelaksanaan visi dan misi, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM mengacu pada kode etik dan ode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi :

1. Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
2. Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (2020-2024) Hal. 25 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian

Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terdapat 4 Kepala Divisi yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Anggaran

Pada tahun 2023 ini ada 22 (dua puluh dua) Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan Pimpinan Tinggi pada Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM RI. Sasaran kegiatan ini pun dijabarkan dalam 60 (enam puluh) indikator kinerja kegiatan dengan target yang dilaksanakan oleh 4 (empat) Divisi diantaranya Divisi Administrasi, Divisi Masyarakat, Divisi Keimigrasian, dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
Divisi Administrasi				
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Rp 16.185.277.000,-
Divisi Masyarakat				
2	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	82 Indeks	Rp 678,115,000,-
3	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	
		Presentase Tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum	90%	
		Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	
4	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	
		Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	
		Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	
		Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	
		Presentase narapidana	17%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
		resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin		
		Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	
		Presentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	
5	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar	Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	
		Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%	
6	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	
		Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	
		Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	
7	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	
		Presentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	
		Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	
		Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	
8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Presentase pengaduan yang diselesaikan	85%	
		Presentase pencegahan gangguan kamtib	80%	
		Presentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Amak pelaku gangguan kamtib	85%	
		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
9	Meningkatnya Pelayanan Keamanan	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
	dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Presentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	
		Presentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	
		Presentase oemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	
10	Meningkatnya pelayanan perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	
		Presentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%	
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	85%	
		Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	
		Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/ penyalhguna/ korban penyalahgunaan narkkotika	27%	
Divisi Imigrasi				
11	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	Rp 1,889,045,000,-
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM				
12	Terselenggaranya	Jumlah Permohonan KI yang	93	Rp

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
	pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	difasilitasi Kantor Wilayah	Layanan	1.500.275.000
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	
13	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan Intelektual	100%	
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Lap	
14	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Presentasi peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	Rp 3.838.512.000
15	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	86%	
16	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentasi rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	Rp 290.000.000,
17	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	17 Orang	
18	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/ Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Keg	Rp 290.000.000,
19	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	
		Presentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	80%	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 Indeks	

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Anggaran
		Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	
		Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	
20	Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	Rp 205.555.000,
		Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	
21	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yan melaksanakan program aksi HAM	3	Rp 265.245.000,
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	2	
		Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	
22	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan kinerja berisikan penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi berdasarkan rencana kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Dengan dasar hukum Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Indikator Kegiatan.

Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk mengukur nilai dari indikator kinerja kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan para Pimpinan Tinggi unit eselon 1 didasari pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Setelah mendapatkan nilai indikator kinerja kegiatan pada masing-masing perjanjian kinerja. Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan realisasi dari rencana kinerja tahun 2023 dan diperoleh angka realisasi dan presentasi pencapaian berdasarkan indikator kinerja outcome dan dihitung menggunakan rumus dibawah ini :

$$\frac{\text{Capaian}}{\text{Target}} \times 100 \% = \text{Realisasi}$$

Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan kinerja kolektif dari seluruh Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pada Tahun 2023, Kantor Wilayah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 26.048.721.000- (Dua Puluh Enam Milyar Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Berikut ini capaian kinerja organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara periode Semester I tahun 2023 yang dijabarkan per Divisi yang ada.

DIVISI ADMINISTRASI

Divisi Administra

Divisi Administrasi melaksanakan 1 (satu) sasaran kegiatan terkait terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan. Sasaran kegiatan ini merupakan program dukungan manajemen dari Sekretariat Jenderal yang diturunkan pada Kantor Wilayah melalui perjanjian kinerja Kepala Kantor Wilayah dan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dengan target 3,1 indeks pada tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Berikut ini capaian dan realisasi yang telah dilaksanakan pada Semester I tahun 2023

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,88 Indeks	125%

Tabel 2 Target dan Realisasi Divisi Administrasi

Indeks Kepuasan Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara diukur melalui survey Balitbang. Survey dilaksanakan setiap bulannya dari bulan Januari sampai dengan Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut :

Bulan	Hasil Survey				Capaian	Target	Realisasi	Jumlah Responden
	% IPK	Indeks	IKM	Indeks				
Januari	96,83	3,87	96,58	3,86	3,87	3,1	125%	36
Februari	96,05	3,84	95,66	3,83	3,83	3,1	124%	57
Maret	98,45	3,94	98,32	3,93	3,94	3,1	127%	95
April	96,14	3,85	96,57	3,86	3,85	3,1	124%	35
Mei	97,52	3,90	97,03	3,88	3,89	3,1	126%	58
Juni	97,54	3,90	97,36	3,89	3,90	3,1	126%	39

Tabel 3 Hasil Survey pada Semester I

Perhitungan Realisasi dari capaian indikator kinerja kegiatan diambil nilai rata-rata dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Hasil Indeks Kepuasan}}{\sum \text{Target Indeks Kepuasan}} \times 100 \% = \frac{3,88}{3,1} \times 100 \% = 125 \%$$

Pada Semester I Tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi

Utara mencapai 3,88 indeks untuk kualitas pelayanan (IKM). Dimana layanan yang diberikan oleh Divisi Administrasi meliputi Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal, Layanan Manajemen SDM Internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Sementara untuk perilaku penyimpangan pelayanan (IPK) mencapai nilai 3,86 indeks dari skala indeks bernilai 4. Sehingga jika dijumlahkan Hasil Indeks Kepuasan pada Kantor Wilayah Sulawesi Utara adalah 3,88 indeks atau 125 % dari target yang telah diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Indeks kepuasan layanan internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,79	122%	3,1	3,8	122,5%

Tabel 4 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan layanan internal di lingkungan kantor wilayah Sulawesi Utara sampai pada tahun 2023 mempunyai target indeks yang sama yaitu sebesar 3,1, dimana pada tahun 2022 tercapai sebesar 3,79 dan pada tahun 2023 tercpai sebesar 3,8 yang mengalami peningkatan nilai indeks kepuasan sebesar 0.01 dibandingkan tahun 2022 atau 0,5 % dengan tahun sebelumnya.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Administrasi					
SK1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien				
IKU1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1

Tabel 5 Target Jangka Menengah Divisi Administrasi pada Renstra Kantor Wilayah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah di Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa target capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah capaian indeks kepuasan layanan sebesar 3,1 indeks. Walaupun dengan target yang sama setiap tahunnya Kantor Wilayah melalui Divisi Administrasi terus mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 melalui peningkatan sarana dan fasilitas penunjang pelayanan internal, pemanfaatan teknologi dan membuat inovasi-inovasi yang bermanfaat, serta peningkatan kompetensi melalui *corporate university*.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja indikator kegiatan diatas pada Divisi Administrasi kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh pegawai pada Divisi Administrasi sekaligus umpan balik dari jajaran kantor wilayah yang menggunakan layanan internal pada Kantor Wilayah, anggaran yang tersedia, serta sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi masing-masing.

d) Kendala dan Solusi

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan pada tahun 2023, Divisi Administrasi masih memiliki beberapa kendala :

- Jumlah penempatan jabatan belum efektif, masih ada jabatan pelaksana yang belum terisi pada sub bidang di Kantor Wilayah. Oleh Bidang kepegawaian dan rumah tangga memberikan alternatif solusi yaitu melakukan perpindahan dari dalam satuan kerja maupun dari unit pelaksana teknis lainnya;
- Pemahaman Reformasi Birokrasi masih berfokus pada pemenuhan datan dukung bukan pada implementasinya. Dan alternatif solusi yang dilakukan oleh Divisi Administrasi adalah melakukan internalisasi secara berkelanjutan;

DIVISI PEMASYARAKATAN

Divisi Pemasyarakatan

Divisi pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun 2023 menjalankan 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan dengan 36 (tiga puluh enam) Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dijelaskan juga bahwa capaian nilai indikator kinerja kegiatandihitung berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing mulai dari Divisi Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Balai Pemasyarakatan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Berikut capaian indikator kinerja kegiatan pada Divisi Pemasyarakatan berdasarkan Kepmenkumham NomorM.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82 Indeks	88 Indeks	107%

Tabel 6 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pemasyarakatan

Nilai indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di Wilayah dihitung dari nilai dari setiap variabel penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan di wilayah dibagi dengan jumlah variabel dikali 100%. Adapun variabel kegiatan yang wajib dilaksanakan pada Kantor Wilayah melalui Divisi Pemasyarakatan adalah :

- 1) Kegiatan Kemanan di Wilayah;
- 2) Indeks Derajat Parameter Kesehatan;
- 3) Kegiatan Pelayanan Tahanan di Wilayah;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Basan dan Baran di Wilayah;
- 5) Kegiatan Pembinaan Narapidana di Wilayah;
- 6) Kegiatan Pengentasan Anak di Wilayah melalui kegiatan pembinaan kepribadian, pembinaan kepribadian dan pemenuhan hak bersyarat;
- 7) Kegiatan Pembimbingan di Wilayah;
- 8) Kerjasama Pemasyarakatan di Wilayah;
- 9) Nilai Indeks Kepuasan Layanan di Wilayah.

Dari 9 variabel kegiatan diatas yang dilaksanakan oleh Divisi Pemasarakatan pada Kantor Wilayah adalah sebagai berikut :

No	Variabel Kegiatan	Jenis Kegiatan yang dilaksanakan	Nilai
1	Kegiatan Kemanan di Wilayah	Koordinasi DILKUMJAKPOL, Pemerintah Daerah, dan Tentaran Nasional Indonesia pada Hari Senin, 17 April 2023	1
2	Indeks Derajat Parameter Kesehatan	Sosialisasi Teknis Pemasarakatan yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 Maret 2023	1
3	Kegiatan Pelayanan Tahanan di Wilayah		1
4	Kegiatan Pengelolaan Basan dan Baran di Wilayah		1
5	Kegiatan Pengentasan Anak		1
6	Kegiatan Pembinaan Narapidana di Wilayah	Pameran hasil karya narapidana di Kantor Wilayah yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2023 di Kantor Wilayah	1
7	Kegiatan Pembimbingan di Wilayah	Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan, Koordinasi Teknis Pemasarakatan, Monitoring dan Evaluasi.	1
8	Kerjasama Pemasarakatan di Wilayah	Layanan Kerjasama, Pengaduan, Perizinan dan Informasi melalui loket informasi layanan pada Kantor Wilayah	1
9	Nilai Indeks Kepuasan Layanan di Wilayah	Belum menghitung nilai indeks kepuasan layanan pada seluruh unit pelaksana teknis pemasarakatan di Kantor Wilayah	0
Total			8

Tabel 7 Variabel Kegiatan pada Divisi Pemasarakatan

Dengan nilai variabel kegiatan sebesar 8. Capaian dari indikator kinerja ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\sum \text{Nilai Variabel Kegiatan}}{9} \times 100 \% = \frac{8}{9} \times 100 \% = 88 \%$$

Skala indeks pada nilai indikator ini adalah 100. Dari pencapaian 88% jika disalin dalam bentuk indeks menghasilkan **(88 / 100) x 100 indeks = 88 indeks**. Dalam hal ini Divisi Pemasarakatan dapat mencapai 107 % dari target yang telah diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022..

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	81	91,68	113%	82	88	107%

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pemasarakatan

Berdasarkan tabel diatas, penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah mengalami peningkatan target dari 81 ke 82 nilai indeks. Untuk tahun 2022 Divisi Pemasarakatan selaku pelaksanan indikator kinerja kegiatan ini dapat mencapai 113%, sementara sampai dengan semester I tahun 2023 capaian dari indikator kinerja kegiatan ini mencapai 107%. Hal ini disebabkan dengan adanya beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan dan sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan pada Semester II tahun 2023, sehinggann Divisi Pemasarakatan dalam mengemban tugas ini optimis untuk pencapaian sampai dengan akhir tahun 2023 dapat melebihi dari capaian tahun sebelumnya.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah					
SK 1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemsarakatan yang Berkualitas di Wilayah				
IKU 1	Indeks Penyelenggaraan Pemsarakatan di Wilayah	80	81	82	83

Tabel 9 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 1 Divisi Pemasarakatan

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target kinerja jangka menengah di Rencana Strategi Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tabel diatas dapat dilihat bahwa target capaian kinerja pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,3 %. Dengan target yang mengalami kenaikan setiap tahunnya Kantor Wilayah melalui Divisi Pemasarakatan terus mengupayakan kinerja yang optimal dalam mencapai target di tahun 2023 dan 2024 melalui koordinasi dengan seluruh unit pelaksana teknis pemsarakatan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja indikator kegiatan diatas pada Divisi Pemasarakatan kantor wilayah tersebut tidak terlepas dari peran seluruh pegawai pada Divisi Pemasarakatan sekaligus seluruh unit pelaksanaan teknis pemsarakatan pada lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

d) Kendala dan Solusi

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan pada tahun 2023, Divisi Pemasarakatan masih memiliki kendala terkait Pemahaman terkait nilai indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah dan perhitungan dari setiap variabel kegiatan, sehingga hal ini memberikan alternatif solusi untuk memberikan pemahaman berdasarkan manual IKU Pemasarakatan dan melakukan kegiatan koordinasi penyusunan LKjIP khususnya Divisi Pemasarakatan dengan Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sasaran kegiatan meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar dihitung dari pelayanan tahanan pada Rumah Tahanan Negara.

Sasaran kegiatan ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang memiliki target 90% pada tahun 2023 yaitu:

1. Presentase menurunnya tahanan yang *overstaying*
2. Presentase Tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum
3. Presentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Semua pencapaian dari indikator kinerja kegiatan diatas dihitung dari capaian pelaksanaan pelayanan tahanan yang ada pada Rumah Tahanan Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara yaitu Rutan Kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu. Berikut capaian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan iniyang akan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan 2, 3 dan 4 pada Divisi Pemasarakatan.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Divisi Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	90%	100%	111%

Tabel 10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2

Indikator Kinerja kegiatan menurunnya tahanan yang *overstaying* dihitung dari jumlah tahanan *overstaying* dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%. Berikut data yang diambil dari Rutan Kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu terkait tahanan yang *overstaying*.

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah tahanan <i>overstaying</i>	Jumlah tahanan
1	Rutan kelas IIA Manado	0	383
2	Rutan kelas IIB Kotamobagu	0	195
Total		0	578

Tabel 11 Data tahanan *overstaying*

Berdasarkan data diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan Presentase menurunnya tahanan yang *overstaying* adalah :

$$\frac{\sum \text{tahanan overstaying}}{\sum \text{tahanan}} \times 100 \% = \frac{0}{578} \times 100 \% = 0 \%$$

Presentase tahanan overstaying di Rutan Kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu adalah 0%. Berdasarkan capaian 0% ini dapat diartikan bahwa tidak adanya tahanan yang *overstaying* pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa presentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Kantor Wilayah adalah 100%.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022..

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Presentase menurunnya tahanan yang <i>overstaying</i>	70%	80%	114%	90%	100%	111%

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 2

Berdasarkan tabel diatas, presentase menurunnya tahanan yang overstaying pada Kantor Wilayah setiap tahunnya melebihi dari target yang diberikan. Setiap tahanan yang akan habis masa penahanan selalu dikonsultasikan dengan pihak penahan baik secara lisan maupun tertulis dalam surat pemberitahuan 10 hari dan 3 hari dimana masa penahanan akan selesai.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah melebihi target jangka menengah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar				
IKU2	Presentasi Menurunnya Tahanan yang Overstaying	70%	80%	90%	100%

Tabel 13 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 2

c) Faktor Keberhasilan

Presentase menurunnya tahanan yang overstaying dapat tercapai pada semester I tahun 2023. Hal ini disebabkan dengan adanya koordinasi dan monitoring dari Divisi Pemasyarakatan kepada Kepala Rutan Kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu terkait dengan tahanan yang akan mengakhiri masa penahanannya dengan pemberian pemberitahuan kepada pihak penahan seperti DILKUMJAKPOL 10 Hari sebelum masa penahanan berakhir.

d) Kendala dan Solusi

Untuk capaian indikator kinerja kegiatan 2 ini belum memiliki kendala.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Presentase Tahanan yang memperoleh Penyuluhan Hukum	90%	80%	88%

Tabel 14 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3

Perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah tahanan yang memperoleh penyuluhan hukum dibagi dengan jumlah tahanan dikali 100%. Berikut perhitungan capaian untuk indikator kinerja kegiatan presentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum.

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah tahanan memperoleh layanan penyuluhan hukum	Jumlah tahanan
1	Rutan kelas IIA Manado	383	383
2	Rutan kelas IIB Kotamobagu	79	195
Total		462	578

Tabel 15 Data Indikator Kinerja Kegiatan 3

Berdasarkan data diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan Presentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah :

$$\frac{\sum \text{tahanan yang memperoleh layanan hukum}}{\sum \text{tahanan}} \times 100 \% = \frac{462}{578} \times 100 \% = 80 \%$$

Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Kantor Wilayah mencapai 80% pada semester I tahun 2023. Pencapaian belum 100% dikarenakan jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Rutan Kelas IIB Kotamobagu sebesar 40% dari total tahanan 195 orang hanya 79 orang mendapatkan layanan penyuluhan hukum, sementara untuk Rutan Kelas IIA Manado telah tercapai 100%. Dimana penyuluhan tersebut bertujuan menjelaskan hak-hak tahanan, proses dan alur pemberian bantuan hukum.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022..

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
presentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum.	70%	70%	100%	90%	80%	88%

Tabel 16 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3

Berdasarkan tabel diatas, presentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum pada Kantor Wilayah sampai dengan semester I tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan. Layanan penyuluhan hukum pada semester II akan difokuskan pada Rutan Kelas IIB Kotamobagu.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar				
IK3	Presentasi Tahanan yang memperoleh Layanan Pelayanan Hukum	70%	80%	90%	100%

Tabel 17 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 3

- c) Faktor Keberhasilan

Faktor Keberhasilan pada Indikator Kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya layanan pelayanan hukum pada Tahanan yang ada di Rutan Kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu. Koordinasi dan Sinergitas yang baik antara Divisi Pemasyarakatan dengan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum pada Rumah Tahanan Negara yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

- d) Kendala dan Solusi

Salah satu kendala dalam pencapaian target pada indikator ini adalah tidak terlaksananya pelayanan hukum pada seluruh tahanan yang ada di Rutan Kelas IIB Kotamobagu. Jarak antar Kantor Wilayah dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu memakan waktu tempu sekitar 4 jam

melalui darat ini juga menjadi salah satu kendala untuk tidak dapat melaksanakan kegiatan penyuluhan secara mendadak. Alternatif solusi yang dapat diberikan selain dengan melakukan perencanaan yang matang terkait dengan perjalanan dinas menuju Rutan Kelas IIB Kotamobagu untuk melaksanakan layanan pelayanan hukum pada seluruh tahanan yang ada atau melakukan pelayanan hukum melalui media online dengan ketentuan yang berlaku.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Divisi Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	presentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	90%	24%	26%

Tabel 18 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4

Perhitungan capaian pada indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum dibagi dengan jumlah pemohon bantuan hukum dikali 100%. Dibawah ini data untuk perhitungan capaian indikator presentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum.

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	Jumlah pemohon bantuan hukum
1	Rutan kelas IIA Manado	59	383
2	Rutan kelas IIB Kotamobagu	79	195
Total		138	578

Tabel 19 Data Indikator Kinerja Kegiatan 4

Berdasarkan data diatas maka capaian indikator kinerja kegiatan Presentase tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum adalah :

$$\frac{\sum \text{tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum}}{\sum \text{pemohon bantuan hukum}} \times 100 \% = \frac{138}{578} \times 100 \% = 24 \%$$

Seluruh tahanan berdasarkan data yang disampaikan adalah pemohon bantuan hukum pada masing-masing Rumah Tahanan Negara, sehingga pencapaian presentasi tahanan yang memperoleh bantuan hukum berkisar 24% dari total tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum atau sekitar 26% dari target yang telah diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
presentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum	80%	80%	100%	90%	24%	26%

Tabel 20 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4

Berdasarkan tabel diatas, presentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Kantor Wilayah sampai dengan semester I tahun 2023 belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk capaian pada tahun 2023 ini agar bisa tercapai 100% akan dikategorikan kembali jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum dengan registrasi yang tercatat pada Rutan Kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK2	Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar				
IK4	Presentasi Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	90%	100%

Tabel 21 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 4

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Divisi Pemasarakatan adalah pahamnya para tahanan terkait dengan pemberian bantuan hukum yang difasilitasi oleh Rumah Tahanan Negara. Untuk itu perlu disampaikan dan dilakukan pendekatan kepada para tahanan agar mau menggunakan bantuan hukum tanpa pungutan biaya kepada para tahanan yang membutuhkan.

- d) Kendala dan Solusi

Kendalam dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan presentase tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum pada Kantor Wilayah yang belum mencapai target yang ditetapkan karena seluruh jumlah tahanan pada Rumah Tahanan kelas IIA Manado dan Rutan Kelas IIB Kotamobagu dijadikan jumlah pemohon bantuan hukum. Sebagai solusi untuk semester II agar bisa tercapai target yang diberikan adalah Divisi Pemasarakatan melakukan klasifikasi jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan hukum.

Dikarenakan jumlah tahanan yang mengajukan permohonan bantuan adalah tahanan yang telah memasukkan berkas perkaranya kepada jasa bantuan hukum dan perlu diregistrasi oleh Rutan kelas IIA Manado dan Rutan kelas IIB Kotamobagu, karena fasilitas bantuan hukum ini bersifat sukarela kepada tahanan yang mau menggunakan fasilitas bantuan hukum yang tersedia.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Sasaran kegiatan ketiga pada Divisi Pemasarakatan adalah meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi memiliki 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan diambil dari pelaksanaan pembinaan kepribadian pada seluruh Lembaga Pemasarakatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara memiliki 11 (sebelas) Lembaga Pemasarakatan.

Berikut ini 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan menjadi Indikator Kinerja kegiatan ke 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 pada Divisi Pemasarakatan periode Semester I Tahun 2023 :

- Indikator ke 5 : Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
- Indikator ke 6 : Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
- Indikator ke 7 : Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
- Indikator ke 8 : Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
- Indikator ke 9 : Presentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin
- Indikator ke 10 : Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- Indikator ke 11 : Presentase narapidana yang bekerja dan produktif

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Divisi Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	-	-

Tabel 22 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 5

Perhitungan pada capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian dibagi dengan jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%. Indikator kinerja kegiatan 5 ini tidak dapat dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sesuai dengan Perjanjian Kinerja karena berdasarkan assesment Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada tahun 2023 tidak ada narapidana resiko tinggi di Unit Pelaksana Teknis wilayah Sulawesi Utara.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	100%	101%

Tabel 23 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 6

Total narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Semester I Tahun 2023 sebanyak 378 orang. Dan semua narapidana yang mendapatkan hak remisi tersebut telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi.

Capaian nilai indikator kinerja kegiatan ini dihitung dari jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi dibagi jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak remisi dikali 100%. Perhitungan capaian pada indikator kinerja kegiatan ini adalah $(378 / 378) \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi dari target yang diberikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah 101 %.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	98%	100%	99%	100%	101%

Tabel 24 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 6

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadiian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
IK6	Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	96%	98%	99%	100%

Tabel 25 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 6

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan 6 ini harus dipantau Komitmen Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan program ataupun kebijakan Pimpinan Pusat dan Kemampuan Petugas yang baik dalam memahami ketentuan tentang Pemberian Hak Remisi, penguasaan tugas dibagian pemberian Hak Remisi, dan penyampaian Usulan Hak Remisi dari UPT secara online dan tepat waktu.

- d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam indikator kinerja kegiatan presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi adalah gangguan jaringan internet, dan kerusakan sarana penunjang tugas pemberian Hak Remisi (Komputer ataupun Server, scanner dan printer). Solusi Menghimbau kepada Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan agar memperhatikan perawatan sarana penunjang tugas pengusulan Hak Remisi (Komputer ataupun Server, scanner dan rinter), dan mengantisipasi apabila terjadi gangguan jaringan internet.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	100%	117%

Tabel 26 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 7

Hak Integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial sampai dengan semester I tahun 2023 sebanyak 114 orang dan semuanya dari jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial.

Nilai indikator kinerja kegiatan presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi dapat dihitung dari jumlah narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi dengan jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk mendapatkan program reintegrasi sosial dikali dengan 100%. Perhitungannya sebagai berikut $(114 / 114) \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi dari target yang diberikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah 117 %.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	95%	118%	85%	100%	117%

Tabel 27 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 7

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadiian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
IK7	Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	80%	85%	95%

Tabel 28 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 7

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan 6 ini harus dipantau Komitmen Pimpinan Lembaga Pemasarakatan dalam menerapkan program ataupun kebijakan Pimpinan Pusat dan Kemampuan Petugas yang baik dalam memahami ketentuan tentang Pemberian Hak Integrasi, penguasaan tugas dibagian pemberian Hak Integrasi dan penyampaian Usulan Hak Integrasi UPT secara online dan tepat waktu.

- d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam indikator kinerja kegiatan presentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi adalah gangguan jaringan internet, dan kerusakan sarana penunjang tugas pemberian Hak Integrasi. Sebagai solusi yaitu menghimbau kepada Pimpinan Lembaga Pemasarakatan agar memperhatikan perawatan sarana penunjang tugas pengusulan Hak Integrasi dan mengantisipasi apabila terjadi gangguan jaringan internet.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	235%	276%

Tabel 29 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 8

Pendidikan adalah hak semua orang termasuk para narapidana sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945. Capaian pada nilai indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dibagi dengan jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dikali dengan 100%. Berikut data narapidana yang mendapatkan hak pendidikan dan jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	jumlah narapidana yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal
Lapas Manado	423	75
Lapas Bitung	0	0
Lapas Tondano	0	72
Lapas Tahuna	41	6
Lapas Lirung	0	1
Lapas Enemawira	0	11
Lapas Tamako	0	5
Lapas Ulu Siau	2	13
Lapas Tagulandang	0	17
Lapas Perempuan	4	0
Lapas Amurang	0	0
Total	470	200

Tabel 30 Data Indikator Kinerja Kegiatan 8

Berdasarkan data diatas perhitungan pada indikator kinerja kegiatan ini adalah **(470 / 200) x 100% = 235 %**.

Berdasarkan capaian tersebut, realisasi dari target yang diberikan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah 276 %.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	93%	116%	85%	235%	276%

Tabel 31 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 8

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadiian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
IK8	Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	80%	85%	90%

Tabel 32 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 8

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan 8 ini dengan melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagai penyelenggaraan Layanan Pendidikan dengan seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang memiliki narapidana dengan kondisi pada indikator kinerja kegiatan ini.

harus dipantau Komitmen Pimpinan Lembaga Pemasarakatan dalam menerapkan program ataupun kebijakan Pimpinan Pusat dan Kemampuan Petugas yang baik dalam memahami ketentuan tentang Pemberian Hak Integrasi, penguasaan tugas dibagian pemberian Hak Integrasi dan penyampaian Usulan Hak Integrasi UPT secara online dan tepat waktu.

- d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam indikator kinerja kegiatan 8 ini adalah adanya keterbatasan Sarana

Pendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan didalam Lapas, dan pembatasan pelaksanaan kunjungan kedalam Lapas. Sebagai solusi yang dapat diberikan yaitu mengajukan pengadaan sarana penunjang kegiatan yang menjadi prioritas, dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadiian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	17%	-	-

Tabel 33 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 9

Perhitungan pada capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin dibagi jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 100%. Indikator kinerja kegiatan9 ini tidak dapat dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara sesuai dengan Perjanjian Kinerja karena berdasarkan assesment Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada tahun 2023 tidak ada narapidana resiko tinggi di Unit Pelaksana Teknis wilayah Sulawesi Utara.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10 pada Divisi Pemasarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadiian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%	23%	74%

Tabel 34 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10

Nilai indikator kinerja kegiatan ke 10 ini dihitung dari jumlah narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah narapidana dikali 100%. Total narapidana yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah 1,287 orang. Dimana narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi berjumlah 297 orang, sehingga pencapaian pada indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung sebagai berikut ($297 / 1287$) x 100% = 23 %.

Berdasarkan capaian diatas maka realisasi untuk indikator kinerja kegiatan presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi adalah 74% dari target yang diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	28%	100%	31%	23%	74%

Tabel 35 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10

b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
IK10	Presentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	28%	31%	35%

Tabel 36 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 8

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan 10 ini ada padanya kerjasama dengan lembaga atau perorangan yang telah memiliki ijin untuk melakukan pelatihan pada warga binaan yang ada di lembaga pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam indikator kinerja kegiatan 10 ini adalah terbatasnya lembaga yang menyiapkan tenaga bersertifikasi untuk mengajarkan kepada warga binaan, sehingga alternatif solusi yang bisa diberikan adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga perorangan yang dapat memberikan pengajaran sekaligus memberikan sertifikat pada warga binaan yang ada.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	117%	162%

Tabel 37 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 11

Nilai indikator kinerja kegiatan 11 ini dihitung dari jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi dengan jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100 %. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara jumlah narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 128 orang dan untuk jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi sebanyak 109 orang. Perhitungan nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah $(128 / 109) \times 100 \% = 117 \%$.

Berdasarkan capaian diatas maka realisasi untuk indikator kinerja kegiatan presentase narapidana yang bekerja dan produktif adalah 162% dari target yang diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Realisasi
Presentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	100%	149%	72%	117%	162%

Tabel 38 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 11

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK3	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadiian Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
IK11	Presentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	72%	77%	82%

Tabel 39 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 11

Jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah memenuhi target pada tahun 2023 bahkan sampai dengan target 2024.

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan 11 ini berkaitan dengan Pimpinan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam mengimplementasikan program turunan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan kemampuan yang baik dari petugas dalam memberdayakan Narapidana agar bisa bekerja dan produktif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ketersediaan sarana penunjang, dan anggaran yang memadai.

- d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam indikator kinerja kegiatan 11 ini adalah tidak semua narapidana bisa diberdayakan bekerja dan produktif dikarenakan sebagian terbentur dengan persyaratan, dan keterbatasan anggaran dan sarana pendukung yang tersedia. Alternatif solusi yang disediakan adalah melakukan pengadaan sarana yang menjadi prioritas penunjang kegiatan pembinaan kemandirian, dan memperbanyak kegiatan pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Sasaran kegiatan keempat pada Divisi Pemasyarakatan adalah meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di Wilayah sesuai standar, dimana sasaran kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu :

- Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya
- Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

Kedua indikator diatas akan menjadi indikator kinerja kegiatan ke 12 dan 13 pada Divisi Pemasyarakatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021 tentang penetapan indikator kinerja utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan pada Bapas Kelas I Manado

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 12 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar	Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%	100%	125%

Tabel 40 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 12

Pelaksanaan indikator kinerja ini adalah Rumah Penyimpanan Barang dan Barang Sitaan Manado. Indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung dari jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya dibagi jumlah seluruh benda sitaan dan barang rampasan dikali 100%. Berikut data jumlah benda sitaan dan barang rampasan yang ada pada Rupbasan Kelas I Manado tahun 2023

Rupbasan Manado	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Jumlah	7899	7980	7916	9869	9914	9914

Tabel 41 Data Benda Sitaan dan Benda Rampasan

Dari jumlah data diatas seluruh benda sitaan dan barang rampasan adalah benda dan barang yang kualitas dan kuantitasnya terjaga. Sehingga capaian pada indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut $(9914 / 9914) \times 100\% = 100\%$

Realisasi capaian pada indikator kinerja kegiatan presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Sulawesi Utara adalah 125% dari target yang telah diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	70%	100%	80%	100%	125%

Tabel 42 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 11

Capaian presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya pada Rumah Penyimpanan benda dan barang sitaan manado meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar				
IK12	Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	70%	80%	90%

Tabel 43 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 11

- c) Faktor Keberhasilan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Rupbasan Kelas I Manado untuk melaksanakan pemeliharaan secara rutin pada basan dan baran serta gudang penyimpanan sebagai berikut :

- Melaksanakan stock opname barang ditiap gudang dan di luar gudang ;
- Mengadakan koordinasi dengan APH yang bertanggungjawab secara yuridis pada basan baran terkait status hukum kondisi dan jumlah basan baran;
- Pelaksanaan Sosialisasi Modul Aplikasi SDP pada tanggal 25-27 Mei 2023 yang dilaksanakan oleh Plh. Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran Direktorat Jenderal Pemasarakatan;
- Rupbasan kelas I Manado melakukan Koordinasi ke Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjen Pemasarakatan di Jakarta tanggal 16 - 17 Maret 2023 dalam rangka

Normalisasi aplikasi SDP Rupbasan;

d) Kendala dan Solusi

Sejauh ini belum mengalami kendala untuk menjaga kualitas dan kuantitas benda dan barang rampasan yang ada.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 13 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar	Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	80%	100%	125%

Tabel 44 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 13

Nilai indikator kinerja kegiatan ini dihitung dari jumlah benda sitaan yang telah eksekusi dibagi dengan jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap) dikali 100%. Pada Rupbasan Kelas I Manado sampai dengan Juni 2023 data terkait indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Jumlah benda sitaan yang telah eksekusi	0	0	256	1	0	670	927
Jumlah benda sitaan yang telah inkrah (berkekuatan Hukum Tetap)	0	0	256	1	0	670	927

Tabel 45 Data Benda Sitaan yang telah dieksekusi

Berdasarkan data diatas sehingga nilai indikator kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

$$(927 / 927) \times 100\% = 100 \%$$

Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah 125 % dari target yang diberikan pada tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	70%	70%	100%	80%	100%	125%

Tabel 46 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 13

Capaian Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap pada Rupbasan Kelas I Manado meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK4	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar				
IK13	Presentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkeuatan hukum tetap	60%	70%	80%	90%

Tabel 47 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 13

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Indikator kinerja Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan melebihi dengan target kinerja dikarenakan koordinasi yang baik serta dilakukan monitoring dan evaluasi dari Divisi Pemasyarakatan kepada Kepala Rupbasan Kelas I Manado secara berkala agar dapat melaksanakan indikator kinerja kegiatan ini dengan baik.

d) Kendala dan Solusi

Sejauh ini belum mengalami kendala untuk indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 14 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsaryakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%	117%	195%

Tabel 48 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 14

Nilai indikator kinerja kegiatan ini dilaksanakan oleh Bapas Kelas I Manado dimana perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan ini dihitung dari jumlah klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga dibagi jumlah klien usia produktif dikali 100%. Berikut ini jumlah klien yang ada pada Bapas Kelas I Manado periode semester I tahun 2023.

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Total
Jumlah klien usia produktif yang memperoleh pekerjaan di luar lembaga	81	65	63	50	59	49	367
Jumlah klien usia produktif	70	64	50	37	52	39	312

Tabel 49 Data Klien Usia Produktif

Berdasarkan data diatas capaian pada presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah $(367 / 312) \times 100\% = 117\%$.

Realisasi presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga atau 195% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	83%	166%	80%	117%	195%

Tabel 50 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 14

Capaian Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara meningkat dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK3	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar				
IK14	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	40%	50%	60%	70%

Tabel 51 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 14

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan menjalankan indikator kinerja kegiatan ini yaitu melakukan pelatihan / ketrampilan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah dan non pemerintah) serta mengupayakan penyaluran bantuan kerja bagi klien usia produktif.

- d) Kendala dan Solusi

Sejauh ini belum mengalami kendala untuk indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 15 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%	15,7%	28%

Tabel 52 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 15

Nilai indikator kinerja kegiatan dihitung dari anak yang mendapatkan putusan pidana penjara dibagi jumlah pendampingan anak dikali 100%. Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara jumlah anak yang mendapatkan putusan pidana sampai dengan semester I tahun sebanyak 31 anak dan jumlah pendampingan anak sebanyak 197 kali. Sehingga capaian pada indikator kinerja kegiatan ini adalah $(31 / 197) \times 100 \% = 15,7\%$.

Berdasarkan capaian tersebut realisasi dari target untuk presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana sebesar 28% dari target yang ditentukan pada tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	0,02%	0,0003	55%	15,7%	28%

Tabel 53 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 15

Capaian realisasi presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara meningkat dari tahun 2022.

b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK3	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar				
IK15	Presentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	40%	50%	60%	70%

Tabel 54 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 15

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan menjalankan indikator kinerja kegiatan ini yaitu mengedepankan pendekatan restoratif justice kepada anak dengan memperhatikan kondisi anak/korban dan masyarakat.

d) Kendala dan Solusi

Indikator kinerja kegiatan ini pada semester I belum dilaksanakan secara maksimal dimana proses diversifikasi bagi ABH yang kasusnya memenuhi syarat Diversifikasi dengan mengedepankan pendekatan restoratif Justice dengan memperhatikan kondisi anak/korban dan masyarakat

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 16 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsaryakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%	52%	148%

Tabel 55 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 16

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada semester I tahun 2023, jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan sebanyak 10 orang dari total 19 orang klien anak. Nilai indikator kinerja ini dihitung dari jumlah klien anak yang melanjutkan pendidikan dibagi jumlah klien anak dikali 100% dengan perhitungan sebagai berikut

$$(10 / 19) \times 100\% = 52\%$$

Realisasi capaian dari target tahun 2023 adalah 148% atau telah melebihi target yang diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	27%	90%	35%	52%	148%

Tabel 56 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 16

Capaian Presentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara meningkat dari tahun 2022 dan telah memenuhi target pada tahun 2023.

b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK3	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemsarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar				
IK16	Presentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	25%	30%	35%	40%

Tabel 57 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 16

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan menjalankan indikator kinerja kegiatan ini yaitu melakukan kerjasama dengan POKMAS LIPAS dibidang pendidikan untuk melaksanakan kesetaraan /persamaan bagi anak yang putus sekolah.

d) Kendala dan Solusi

Sejauh ini belum mengalami kendala untuk indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%	100%	125%

Tabel 58 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini oleh LPKA Kelas II Tomohon dimana perhitungan capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah anak yang terampil dibagi jumlah anak yang mengikuti pendidikan keterampilan dikali 100 %. Pada LPKA Kelas II Tomohon jumlah anak terampil sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 15 anak dan yang telah mengikuti pendidikan keterampilan sebanyak 15 anak. Sehingga perhitungan capaian pada indikator kinerja kegiatan ini adalah $(15 / 15) \times 100 \% = 100\%$.

Untuk realisasi capaian dari target yang diberikan pada tahun 2023 sebesar 125% pada semester I tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	36%	51%	80%	100%	125%

Tabel 59 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17

Capaian Presentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun 2022.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
IK17	Presentase anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat kuantitasnya	70%	80%	90%	100%
	Presentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%
	Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%	80%	90%	100%
	Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%	80%	90%	100%

Tabel 60 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 17

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

a) Faktor Keberhasilan

Untuk mendukung keberhasilan indikator kinerja kegiatan ini bersama dengan Divisi pemasyarakatan bersama dengan LPKA Kelas II Tomohon mengadakan pelatihan yang mudah seperti Pangkas rambut sehingga hal ini bisa diikuti oleh seluruh anak yang ada pada LPKA Kelas II Tomohon.

b) Kendala dan Solusi

Kendala pencapaian pada indikator kinerja kegiatan ini adalah minat anak binaan untuk mengikuti pendidikan terampil yang diselenggarakan oleh Divisi Pemasyarakatan dan LPKA Kelas II Tomohon. Sehingga alternatif solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan minat pada anak terkait pelaksanaan keterampilan ini yaitu dengan mewajibkan kegiatan keterampilan untuk diikuti oleh seluruh anak binaan yang ada pada LPKA Kelas II Tomohon.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 18 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%

Tabel 61 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 18

Pada LPKA Kelas II Tomohon jumlah anak yang mendapatkan program reintegrasi sosial pada Semester I tahun 2023 sebanyak 24 anak dan ke-24 anak tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan hak integrasi. Sehingga capaian pada indikator kinerja kegiatan ini didapat dari jumlah anak yang mendapatkan program reintegrasi sosial dibagi jumlah anak yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan program reintegrasi sosial dikali 100 % $(24/24) \times 100\% = 100\%$ atau 100 % dari target yang diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 62 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 18

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasaryakatan					
SK3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
IK18	Presentase anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%	100%

Tabel 63 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 18

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Untuk membantu agar anak binaan dapat memperoleh hak integrasi yang dilaksanakan dari LPKA Kelas II Tomohon bersama Divisi Pemasarakatan yaitu membantu pengurusan kelengkapan berkas dari anak yang akan mendapatkan program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Asimilasi Rumah. Hal ini untuk anak binaan dapat memenuhi dokumen dengan cepat dan tepat sesuai dengan waktu yang diberikan.

d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam pemenuhan nilai indikator kinerja kegiatan ini adalah domisili orang tua yang jauh dari Kota Tomohon sehingga alternatif solusi yang diberikan adalah mendata anak yang memenuhi syarat untuk disampaikan sebelum batas pengumpulan berkas dan disampaikan kepada orangtua atau wali dari anak binaan tersebut. Kendala lainnya pada keterlambatan Litmas dari Bapa Kelas I Manado, sehingga ini harus terus dilakukan monitoring dan evaluasi agar tidak terjadi pada pemenuhan dokumen selanjutnya.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 19 pada Divisi Pemasyarakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	90%	100%	111%

Tabel 64 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 19

Jumlah anak pada LPKA Kelas II Tomohon berjumlah 54 anak mendapatkan hak pengasuhan sesuai standar yang ada. Hal ini sudah menjadi tugas utama dari LPKA Kelas II Tomohon untuk memberikan pengasuhan supaya anak binaan bisa sadar dan tidak mengulangi tindak kejahatannya. Nilai indikator kinerja kegiatan ini dapat dihitung dari jumlah anak yang memperoleh pengasuhan dibagi jumlah anak dikali 100% $(54/54) \times 100\%$ = 100 % atau 111% dari target yang ditetapkan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%	90%	100%	111%

Tabel 65 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 19

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasyarakatan					
SK3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
IK19	Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%	80%	90%	100%

Tabel 66 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 19

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara capaian pada semester I telah memenuhi target 2023 bahkan sampai dengan tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Hak Pengasuhan anak merupakan tugas utama dari LPKA Kelas II Tomohon untuk memberikan pengajaran kepada anak binaan agar mereka sadar terhadap kesalahan yang mereka lakukan dan tidak mengulangi pelanggaran yang sudah mereka buat. Langkah keberhasilan untuk memberikan pengasuhan kepada anak, kepala LPKA Kelas II Tomohon memberikan anak binaan kepada pegawai yang berkompeten untuk mendidik dan memberikan pengajaran yang baik kepada anak binaan secara langsung. Sehingga 54 anak binaan yang ada pada LPKA Kelas II Tomohon bisa memperoleh hak pengasuhan anak secara menyeluruh

d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 20 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%	72%	80%

Tabel 67 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 20

Pendidikan pada anak binaan juga menjadi hal penting dalam pengasuhan anak binaan. Hal ini terlihat bahwa jumlah anak binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal pada LPKA Kelas II Tomohon ini sebanyak 39 anak binaan. Sehingga nilai pada indikator kinerja kegiatan dapat dihitung dari jumlah anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal dibagi jumlah anak dikali 100%. Perhitungan capaian untuk nilai indikator kinerja kegiatan ini adalah $(39 / 54) \times 100\% = 72\%$.

Perhitungan realisasi untuk presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar pada semester I ini adalah 80 % dari target yang diberikan pada tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	80%	100%	125%	90%	72%	80%

Tabel 68 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 20

Jika dilihat pada tabel diatas target pada tahun 2023 belum terpenuhi pada Semester I. Dan belum bisa melampaui capaian pada tahun 2022.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pemasarakatan					
SK3	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
IK20	Presentase anak yang memperoleh hak pengasuhan sesuai standar	70%	80%	90%	100%

Tabel 69 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 20

- c) Faktor Keberhasilan

Indikator kinerja Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan Non Formal belum dapat dilaksanakan sesuai target kinerja yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 80 %, dengan kendala utama yaitu syarat pemberkasan anak yang lama dipenuhi oleh orangtua/wali sehingga ke depannya orang tua anak harus lebih kooperatif.

- d) Kendala dan Solusi

Kendala utama dalam pemenuhan target presentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal adalah pemberkasan anak yang membutuhkan waktu lama dari orangtua/wali. Sehingga alternatif solusi yang bisa diberikan adalah menyampaikan secara berulang dan terus melakukan koordinasi dengan orang tua anak / wali agar bisa kooperatif dalam hal pengurusan anak yang membutuhkan pendidikan formal dan non formal pada LPKA Kelas II Tomohon.

DIVISI PEMASYARAKATAN

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 21 pada Divisi Pemasaryakatan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasaryakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Presentase pengaduan yang diselesaikan	85%	-	-

Tabel 70 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 21

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Presentase pengaduan yang diselesaikan belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023 dan akan terealisasi pada Semester II Tahun 2023.

DIVISI IMIGRASI

Indikator Kinerja Semester I Tahun 2023 yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Imigrasi terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah; dan
- Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

Kedua indikator ini mendukung sasaran kegiatan dari Direktur Jenderal Imigrasi yaitu meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Imigrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25 Indeks	3,97 Indeks	122%

Tabel 71 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Imigrasi

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat di ukur dengan survey IKM setiap bulannya yang di lakukan oleh Satuan Kerja Keimigrasian di lingkungan Sulawesi Utara yang diisi oleh pengguna layanan pada Kantor Imigrasi ataupun pada Rumah Detensi Imigrasi. Berikut data survey yang diambil pada 6 (enam) satuan kerja keimigrasian pada lingkungan sampai dengan bulan Juni 2023.

Satker	Hasil Survey																	
	Januari			Februari			Maret			April			Mei			Juni		
	IPK	IKM	Respn	IPK	IKM	Respn	IPK	IKM	Respn	IPK	IKM	Respn	IPK	IKM	Respn	IPK	IKM	Respn
Kanim Manado	3,97	3,91	36	3,98	3,99	40	3,99	3,99	80	3,89	3,84	70	3,91	3,89	66	3,95	3,92	40
Kanim Bitung	4	4	46	4	4	50	3,98	3,98	75	4	4	39	3,95	3,96	45	3,92	3,91	85
Kanim Tahuna	3,86	3,85	21	3,98	3,97	33	3,95	3,93	35	3,93	3,91	32	4	4	37	4	4	28
Kanim Kotamobagu	4	4	42	3,99	3,99	40	4	4	50	3,99	3,99	53	4	3,99	52	3,98	3,98	43
Rudenim	3,99	3,99	51	3,98	3,98	52	4	4	51	4	4	52	4	4	27	4	4	54

Tabel 72 Data Survey UPT Imigrasi

Berdasarkan data survey diatas secara keseluruhan nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah yaitu 3,97 indeks atau 122% dari target yang diberikan.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,2	3,7	115%	3,25	3,97	122%

Tabel 73 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Imigrasi

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Imigrasi					
SK	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Kantor Wilayah				
IK1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara	3.15	3.20	3.25	3.30
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.11	3.12	3.13	3.14

Tabel 74 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja 1 pada Divisi Imigrasi

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat pada satuan kerja imigrasi yang ada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara adalah pelayanan prima yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan layanan Kantor Imigrasi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

- d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk memenuhi target pada indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI IMIGRASI

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Divisi Imigrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13 Indeks	-	-

Tabel 75 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Indeks Pengamanan Keimigrasian di ukur dengan ESurvey. Survey ini dilakukan oleh setiap pegawai di Divisi Keimigrasian dan Satuan Kerja Keimigrasian serta pengisian survey ini juga di lakukan oleh Anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) pada instansi lain/ stakeholder.

Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan 2 pada Divisi Imigrasi untuk penarikan data yang mendukung nilai dari indikator ini akan disampaikan pada laporan semester II tahun 2023. Sehingga nilai capaian belum bisa dilaporkan pada LKjIP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menunjang Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah dengan 6 (enam) Pimpinan Tinggi pada Unit Eselon 1.

Total sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebanyak 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 21 (dua puluh satu) Indikator kegiatan kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Presentasi peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	5%	-52,6%

Tabel 76 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah “Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah” dengan target sebesar 5%. Total pendapatan PNBP untuk layanan administrasi hukum umum di wilayah Sulawesi Utara untuk tahun 2023 adalah Rp. 2.337.900.000 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Hasil PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah ini lebih tinggi dibanding pendapatan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 4.939.800.000 (empat milyar Sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Ribu Rupiah). Berikut volume layanan dan jumlah PNBP yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada tahun 2022 dan 2023 (semester I).

KANTOR WILAYAH	2022		2023	
	VOLUME LAYANAN	JUMLAH PENERIMAAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH PENERIMAAN
Sulawesi Utara	57.771	4.939.800.000	26.453	2.337.900.000

Tabel 77 Data Layanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah

Berdasarkan data diatas dapat dihitung capaian indikator kinerja kegiatan tersebut dengan perhitungan jumlah PNBP tahun berjalan dikurang jumlah PNBP tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah PNBP tahun sebelumnya dikali 100 %. Perhitungan capaian nilai tersebut sebagai berikut :

Untuk realisasi yang didapat dari indikator kinerja kegiatan ini adalah

$$\frac{\text{Rp } 2.337.900.000,- - \text{Rp } 4.939.800.000,-}{\text{Rp } 4.939.800.000,-} \times 100 \% = (52,6) \%$$

$$(52,6) / 5 * 100 = (1052)\%$$

Sesuai dengan hasil diatas, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara belum ada peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum sampai dengan bulan Juni 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentasi peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5%	7%	140%	5%	-52,6%	-1052%

Tabel 78 Perbandingan capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Berdasarkan tabel diatas, presentase capaian pada tahun ini belum meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun 2022.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK1	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah				
IKU1	Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	3%	4%	5%	6%

Tabel 79 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- c) Faktor Keberhasilan

Indikator Kinerja Kegiatan ini bisa berhasil dengan meningkatnya penerimaan layanan

administrasi hukum umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

d) Kendala dan Solusi

Pencapaian Indikator Kinerja kegiatan ini belum tercapai sesuai dengan target yang diberikan dikarenakan perbandingan yang digunakan adalah pencapaian PNBP pada tahun 2022, sementara pencapaian PNBP tahun 2023 menggunakan periode januari sampai dengan juni 2023. Untuk alternatif solusi pada semester yang kedua. Subbidang Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara akan terus melakukan sosialisasi atau Diseminasi kepada masyarakat di Sulawesi Utara sekaligus memperkenalkan jenis layanan yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	86%	100%	116%

Tabel 80 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 1 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Indikator Kinerja pada Sasaran Kegiatan ini adalah Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah. Target yang ditetapkan adalah sebesar 86%. Pada tahun 2023, terdapat 3 laporan pengaduan masyarakat terhadap notaris yang terdiri dari 2 laporan kepada 2 orang Notaris Kota Manado dan 1 laporan kepada 1 orang Notaris Kabupaten Minahasa Utara. Namun dalam pelaksanaannya, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara telah menyelesaikan laporan pengaduan tersebut. Sehingga capaian pada indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%.

Perhitungan nilai indikator kinerja kegiatan ini adalah $3 / 3 * 100\% = 100\%$.

Pencapaian realisasi untuk penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah sebesar 116 %, melebihi dari target yang diberikan pada tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	82%	100%	122%	86%	100%	116%

Tabel 81 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 2 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Berdasarkan tabel diatas, presentase capaian pada tahun ini telah terpenuhi meskipun data yang dihitung menggunakan data sampai dengan juni 2023.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK2	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW, dan MPD				
IKU2	Presentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah	80%	83%	86%	89%

Tabel 82 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 2 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini karena adanya koordinasi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terkait layanan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah Notaris dengan melakukan pengawasan berkala atau melakukan pemanggilan rapat terkait dengan laporan yang muncul agar dapat segera ditindaklanjuti.

- d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk memenuhi target pada indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 3 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	93 Layanan	450	500%

Tabel 83 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 3

Perhitungan capaian pada indikator kinerja kegiatan 3 ini adalah umlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah. Data jumlah layanan KI yang difasilitasi di Wilayah adalah sejumlah 450 permohonan KI. Sehingga perhitungan yang digunakan adalah jumlah layanan yang difasilitasi dibagi dengan target dikali dengan 100%. Perhitungan realisasi sebagai berikut ($450 / 93$) x 100 % = 500 %.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	90	90	100%	93	450	500%

Berdasarkan tabel diatas, presentase capaian pada tahun ini telah terpenuhi bahkan melebihi dari target yang diberikan.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				
IK3	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	85	90	93	99
	Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	1	1	1

Tabel 84 Tabel Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 3

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan peningkatan permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah dikarenakan sosialisasi atau promosi yang dilaksanakan oleh subbidang Kekayaan Intelektual meliputi

- Pelaksanaan Kegiatan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis;
- Pelaksanaan Kegiatan Permohonan Pendaftaran KI KOMUNAL; dan
- Kegiatan Perjanjian Kerja Sama Kekayaan Intelektual dengan Universitas yang ada di Sulawesi Utara.

d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk memenuhi target pada indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 4 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	100%

Tabel 85 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 4

Capaian kinerja pada indikator ini dihitung dari jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual berdasarkan lokus yang dilaksanakan pada provinsi Sulawesi Utara dengan tanggal pelaksanaan sebagai berikut :

No	Sasaran	Pelaksanaan
1	UMKM dan Instansi terkait	17 Februari 2023
2	Diseminasi Kawasan Karya Cipta	14 Maret 2023
3	Diseminasi perlindungan Hak KI	24 Maret 2023
4	Diseminasi Hak Cipta	12 – 14 April 2023
5	Diseminasi merk kerja sama dengan komisi banding merek	22 Juni 2023

Tabel 86 Pelaksanaan kegiatan diseminasi

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	5	500%	1	5	500%

Tabel 87 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 4

Berdasarkan tabel diatas, presentase capaian pada tahun ini telah terpenuhi bahkan melebihi dari target yang diberikan.

- Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 sudah memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah				
IK4	Jumlah Pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1	1	1	1

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan diseminasi dan promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah didukung dengan mobilitas dari seluruh subbidang Kekayaan Intelektual untuk pelaksanaan diseminasi dan promosi. Baik langsung menuju ke instansi terkait, kunjungan kepada seluruh pelaksana usaha dan kerjasama dengan para komunitas wirausaha di Sulawesi Utara.

d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk memenuhi target pada indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

Tabel 88 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 5

Untuk Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 5 sampai dengan bulan Juni 2023 Kantor Wilayah menerima aduan dari Masyarakat melalui telepon dan sudah ditindaklanjuti berupa perlindungan perizinan. Sehingga nilai capaian dapat dihitung dari jumlah aduan yang diselesaikan dibanding dengan jumlah aduan yang masuk dikali 100%. Perhitungannya sebagai berikut $(1 / 1) \times 100\% = 100\%$

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan Intelektual	100%	80%	80%	100%	100%	100%

Tabel 89 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 5

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK4	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal				
IK4	Presentase penanganan aduan pelanggaran kekayaan Intelektual	100	100	100	100

Tabel 90 Target Jangka Menengah pada Indikator Kinerja Kegiatan 5

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 sudah memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan penanganan aduan pelanggaran kekayaan Intelektual adalah dengan merespondnya pengaduan dengan cepat dan tepat sesuai dengan Tata Nilai BerAkhlak dan PASTI.

d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk memenuhi target pada indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	1 Lokus	50%

Tabel 91 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 6

Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah adalah dengan melakukan kunjungan ke pusat perbelanjaan Manado Trade Centre dan melakukan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha di tempat tersebut. Perhitungannya didapat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi dengan target pelaksanaan kegiatan dikali dengan 100% atau $(1 \text{ lokus} / 2 \text{ lokus}) \times 100\% = 50\%$.

Sehingga capaian pada indikator kinerja kegiatan ini baru terlaksana 50% dari target yang diberikan

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	4	400%	2	1	50%

Tabel 92 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 6

b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK4	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal				
IK6	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	1	2	2

Tabel 93 Target Jangka Menengah pada Indikator Kinerja Kegiatan 6

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah adalah dengan turun langsung kepada pelaku usaha yang ada di Kota Manado.

d) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala untuk memenuhi target pada indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 7 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	%
Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	-	-

Tabel 94 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 7

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Pemantauan Produk Keakyaan Intelektual di Wilayah, bidang Pelayanan Hukum masih melakukan pemantauan ke Instansi terkait di wilayah Kota/ Kabupaten dan akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 8 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Presentasi rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	85%%	106%

Tabel 95 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 8

Pencapaian indikator kinerja kegiatan presentasi rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham dihitung dari Jumlah fasilitasi perancangan perda dibagi dengan permohonan dikali dengan 100%.

Pada Semester I tahun 2023 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah masuk permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah yang telah masuk berjumlah 272 rancangan.

Yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah berjumlah 234 rancangan dengan rincian :

- Ranperda Eksekutif 4 rancangan
- Ranperda Legislatif 4 rancangan
- Ranperkarda 30 rancangan

Berdasarkan data diatas, capaian indikator kinerja kegiatan presentasi rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah dapat dihitung dari jumlah fasilitasi perancangan perda dibagi dengan permohonan dikali dengan 100% dengan perhitungan $(234 / 274) \times 85\% = 100\%$. Dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator kinerja ini adalah 85% atau 106% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Presentasi rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	465%	581%	80%	85%%	106%

Berdasarkan tabel diatas, presentase capaian pada tahun ini sampai dengan semester I telah melebihi target yang diberikan. Jika dibandingkan dengan capaian keseluruhan dengan tahun 2022 belum ada peningkatan secara signifikan. Tentunya pada semester II kedepan Bidang Hukum dengan semua tim perancang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara akan berupaya untuk melebihi capaian tahun 2022.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 sudah memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK5	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah				
IK8	presentase Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilyah Kemenkumham	60%	70%	80%	90%

- c) Faktor Keberhasilan

Kunci keberhasilan Kantor wilayah Kementerian Huukumm dan HAM Sulawesi Utara dalam melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah telah melakukan inovasi dengan membuat aplikasi “HarmonisasiJo”. Aplikasi yang dapat mempermudah pemenuhan dokumen awal dalam pengajuan rancangan peraturan daerah. Selai itu, sinergitas yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara dengan Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga mempermudah tim perancang dan tim hukum dari instansi terkait untuk melaksanakan harmonisasi.

d) Kendala dan Solusi

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah sebagai berikut :

- Banyaknya jumlah permohonan yang masuk ke Bidang Hukum;
- Terbatasnya ruang rapat;
- Jumlah staff di Subbid FPPHD hanya 2 (dua) orang, 1 (satu) orang diperbantukan di Sekretaris Pimpinan;
- Prosedur harmonisasi, sesuai surat edaran Menteri harus dilaksanakan selama 15 hari kerja setelah diverifikasi lengkap;
- Prosedur harmonisasi, sesuai surat edaran Menteri pelaksanaan harmonisasi harus dipimpin oleh Pimpinan Tinggi;
- Bidang Hukum dalam hal ini Subbid FPPHD melaksanakan kegiatan lain sesuai RKAK/L; dan
- Anggaran yang tersedia untuk harmonisasi 78 rapat (setelah direvisi)

Dari kendala di atas berikut ini alternatif solusi yang bisa diberikan,

- Dalam 1 hari kerja, dilaksanakan 10 (sepuluh) s/d 12 (dua belas) rapat rancangan;
- Dilakukan peminjaman ruangan rapat Divisi lain (Pemasyarakatan);
- Perancang Peraturan Perundang-Undangan dilibatkan dalam pengelolaan administrasi Rapat Harmonisasi;
- Dilakukan penyesuaian jadwal antar harmonisasi dan kegiatan yang melekat di Bidang Hukum; dan
- Melakukan koordinasi dengan instansi pembina (DJ PP).

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 9 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	17 Orang	15 Orang	88%

Tabel 96 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 9

Indikator kinerja kegiatan ini terbatas pada jumlah pegawai perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. sampai dengan bulan Juni 2023 jumlah pegawai perancang pada Kantor Wilayah yakni 15 (lima belas) orang. Sehingga pembinaan diberikan kepada 15 (lima belas) orang pegawai untuk peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Perhitungan nilai capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah $15 / 17 * 100\% = 88\%$.

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pada jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan data target sesuai dengan realisasi pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara yakni 15 (lima belas) Orang.

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- a) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	16	16	100%	17	15	88%

Tabel 97 Perbandingan capaian indikator kinerja kegiatan 9

Berdasarkan tabel diatas, presentase capaian pada tahun ini sampai dengan semester I tidak melebihi target yang diberikan. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai perancang pada Kantor Wilayah Kementerian Huukum dan HAM Sulawesi Utara berjumlah 15 orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada pengurangan 2 orang pegawai perancang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 belum memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK6	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan				
IK9	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	15	16	17	17

- c) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan ini yaitu jika adanya penambahan tenaga perancang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

- d) Kendala dan Solusi

Pencapaian pada indikator kinerja kegiatan ini ada pada pemenuhan kebutuhan pegawai pada bidang hukum khususnya tenaga perancang. Sudah hampir 2 tahun sejak penerimaan cpns tahun 2021. Belum adanya formasi tenaga perancang yang dibuka untuk Kantor Wilayah, sehingga solusi yang dapat diberikan adalah selain melakukan telaah terhadap beban kerja dan analisa jabatan, kita menggunakan analis hukum yang ada pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara untuk terlibat pada kegiatan harmonisasi dengan pemerintah daerah atau instansi terkait seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/ Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

Tabel 98 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 10

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Wilayah melalui bidang Hukum sampai dengan semester I Tahun 2023 yaitu

- 1) Kegiatan Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum (15-24 Maret)
- 2) Kegiatan Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum (19 Juni)

Sehingga dengan target yang diberikan 2 kegiatan pada tahun 2023 telah dicapai pada semester I tahun 2023 dengan realisasi **100%**

Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

- 1) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2022.

INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	4	200%	2	2	100%

Tabel 99 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 10

- 2) Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kegiatan pada tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategi Kantor Wilayah.

Pada capaian indikator kinerja kegiatan periode semester I pada tahun 2023 telah memenuhi target akhir tahun 2023 bahkan sampai dengan target tahun 2024.

No	Sasaran Kegiatan /Indikator Kegiatan	Target			
		2021	2022	2023	2024
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM					
SK6	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan				
IK10	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	2	2	2

Tabel 100 Target Jangka Menengah Indikator Kinerja Kegiatan 10

3) Faktor Keberhasilan

Keberhasilan pada indikator kinerja kegiatan ini yaitu jika adanya penambahan tenaga perancang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

4) Kendala dan Solusi

Belum ada kendala dalam pencapaian nilai indikator kinerja kegiatan ini.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	82%	-	-

Tabel 101 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 11

Untuk indikator Kinerja Kegiatan presentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKJP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 12 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,75 indeks	-	-

Tabel 102 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 12

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Indeks kepuasan layanan bantuan hukum akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 13 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	-	-

Tabel 103 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 13

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 14 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	-	-

Tabel 104 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 14

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Presentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 15 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	-	-

Tabel 105 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 15

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Presentase Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 16 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Rekomendasi hasil analisis strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku	-	-

Tabel 106 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 16

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Hasil penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	-	-

Tabel 107 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 17

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 17 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Kab / Kota Peduli HAM	2 Instansi Pemerintah	-	-

Tabel 108 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 17

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kabupaten Kota Peduli HAM akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 18 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	-	-

Tabel 109 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 18

Untuk indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 19 pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Realisasi
Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi	-	-

Tabel 110 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan 19

Untuk indikator Kinerja Kegiatan tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah akan diselesaikan pada Semester II. Capaian untuk semester ini belum bisa dilaporkan pada LKjP Semester I Tahun 2023.

Realisasi Anggaran

Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari 9 (sembilan) Petikan DIPA dari masing-masing unit Eselon I. Alokasi dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara pada Semester I Tahun 2023 sebagai berikut:

DIVISI	ESELON I	PAGU ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
ADMINISTRASI	SETJEN	21.704.847.000	10.735.273.928	49,46%
PEMASYARAKATAN	PAS	678.115.000	233.691.068	65,54%
IMIGRASI	IMIGRASI	1.889.045.000	942.238.027	50,12%
YANKUMHAM	PP	290.000.000	100.000.000	65,52%
	HKI	1.500.275.000	580.514.703	61,31%
	BPPHAM	205.555.000	87.855.762	57,26%
	AHU	3.838.512.000	1.649.198.547	57,04%
	HAM	265.245.000	136.065.500	48,70%
	BPHN	1.199.700.000	649.423.672	45,87%

Tabel 111 Realisasi Anggaran sd 2 Juli 2023

Nilai IKPA

No	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot
				Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP/TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output		
1	408863	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (AHU)	Nilai Bobot (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	90,00	90,00%
2	408864	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (PAS)	Nilai Bobot (%)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	97,70	100,00	100,00	79,77	80,00%
3	408867	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (PP)	Nilai Bobot (%)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	93,55	100,00	100,00	79,36	80,00%
4	408861	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO (SETJEN)	Nilai Bobot (%)	100,00	93,25	98,47	100,00	100,00	99,55	100,00	100,00	98,97	100,00%
5	408871	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (BPPHAM)	Nilai Bobot (%)	100,00	89,72	100,00	0,00	0,00	99,47	100,00	100,00	78,92	80,00%
6	408865	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (IMIGRASI)	Nilai Bobot (%)	100,00	88,82	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	68,88	70,00%
7	408869	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (BPHN)	Nilai Bobot (%)	100,00	91,61	96,58	0,00	0,00	98,97	100,00	100,00	78,37	80,00%
8	408868	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (HAM)	Nilai Bobot (%)	100,00	77,81	98,70	0,00	0,00	97,00	100,00	100,00	77,22	80,00%
9	408866	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO (HKI)	Nilai Bobot (%)	100,00	59,91	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	85,99	90,00%
RATA-RATA				100,00	90,52	97,70	77,24	79,67	89,26	100,00	87,10	89,98	95%

Tabel 112 Nilai IKPA 9 DIPA Kantor Wilayah

Berdasarkan data diatas Nilai IKPA Kanwil Setjen mendapatkan 100

Capaian Kinerja Lainnya

E-Performance

Capaian Kinerja Lainnya Capaian Kinerja E-Performance Berikut merupakan capaian kinerja kantor wilayah Sulawesi Utara tahun 2022 melalui laman <https://e-performance.kemenkumham.go.id/>:



Penginputan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dalam aplikasi e-performance dilakukan secara periodik tiap triwulan I-IV di tahun 2023

SMART

Monitoring Nilai SMART pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara.

No	Nama Satker	Nilai	Predikat
1	LPP Kelas IIB Manado	95,33	Sangat Baik
2	Balai Pemasarakatan Kelas I Manado	93,58	Sangat Baik
3	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Bitung	93,56	Sangat Baik
4	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tagulandang	94,89	Sangat Baik
5	Kanwil_PP	92,88	Sangat Baik
6	Rudenim Manado	92,67	Sangat Baik

No	Nama Satker	Nilai	Predikat
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado	92,47	Sangat Baik
8	Kanwil_AHU	91,86	Sangat Baik
9	Kanwil_PAS	91,51	Sangat Baik
10	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lirung	91,49	Sangat Baik
11	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau	91,03	Sangat Baik
12	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tahuna	90,50	Sangat Baik
13	Rupbasan Kelas I Manado	90,28	Sangat Baik
14	Kanwil_KI	90,21	Sangat Baik
15	Badiklat Hukum dan HAM Sulut	89,74	Baik
16	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado	89,44	Baik
17	Kanwil_BPHN	89,27	Baik
18	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Tamako	89,27	Baik
19	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Enemawira	88,43	Baik
20	Kanwil_Imigrasi	88,29	Baik
21	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	87,91	Baik
22	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Amurang	87,70	Baik
23	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	87,06	Baik
24	Rutan Kelas IIB Kotamobagu	86,22	Baik
25	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	85,93	Baik
26	Kanwil_HAM	84,88	Baik
27	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon	83,66	Baik
28	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tondano	81,08	Baik
29	Kanwil_Sekjen	79,01	Cukup
30	Kanwil_BPPHAM	77,63	Cukup
31	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	65,62	Cukup

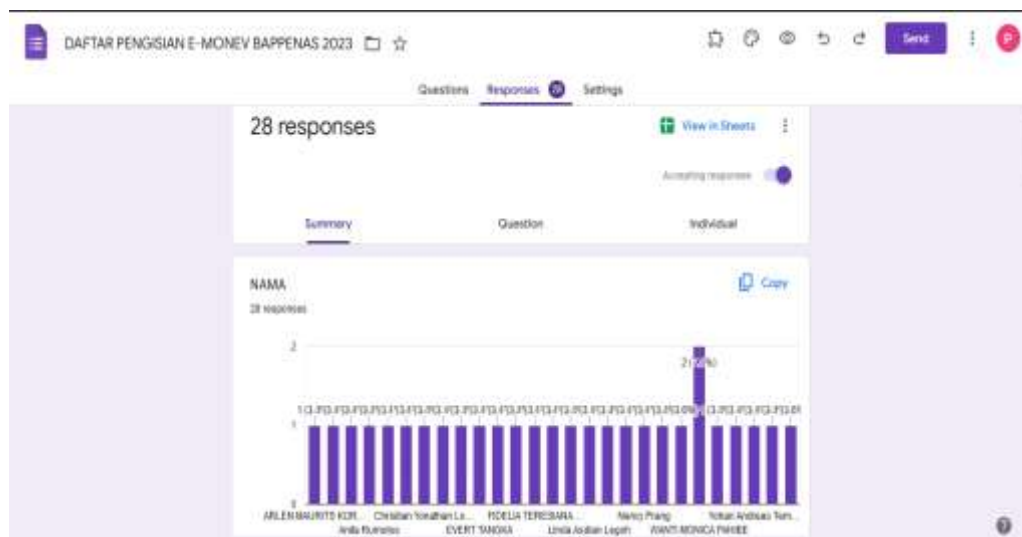
Tabel 113 Data Nilai Sakti

Pengisian kolom koreksi pada Aplikasi SMART periode bulan Januari– Juni (Semester I) Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja pada Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Masih terdapat 3 (tiga) satuan kerja yang nilai SMART masih dalam kategori CUKUP disebabkan adanya penambahan dana pada Satker Kanwil_Setjen serta kurangnya konsistensi capaian realisasi output (kegiatan) yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana di Triwulan II. Meskipun pencapaian nilai SMART Triwulan II sudah lebih baik dibandingkan nilai SMART pada Triwulan I, masih sangat perlu konsistensi pengisian Capaian Realisasi Anggaran dan memastikan TVRO tercapai untuk meningkatkan nilai SMART menjadi SANGAT BAIK.

E-Monev Bappenas

Berikut kami sampaikan bentuk monitoring dan evaluasi Pengisian E-Monev Bappenas pada tahun 2023 pada Semester I (Januari – Juni):

- Pada Bulan Januari aplikasi masih dalam proses maintenance dan tidak bisa diakses untuk dilakukan pengisian pada Bulan Januari:
- Pada Bulan Februari aplikasi masih dalam proses maintenance dan tidak bisa diakses untuk dilakukan pengisian pada Bulan Februari
- Sampai dengan Bulan Juni, satuan kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah mengisi sesuai dengan format yang tersedia pada E-Monev Bappenas dan dilakukan Monitoring secara berkala setiap Bulan melalui Google Form dengan tautan <https://forms.gle/iVxakkdCkdC53yJFA>.



Gambar 5 Tampilan Inputan EMonev Bappenas

Hasil Pemenuhan Pelaporan E-Monev Bappenas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada semester I (Januari – Mei) telah terlaksana dengan baik dengan Pemenuhan Pengisian E-Monev pada setiap satuan kerja sudah mencapai 100% pada bulan Juni masih dalam proses pengisian dengan batas yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 5 Bulan Juli 2023.

KANWIL -SETJEN



Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Sekretariat Jenderal (408861) telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

KANWIL - BPHN

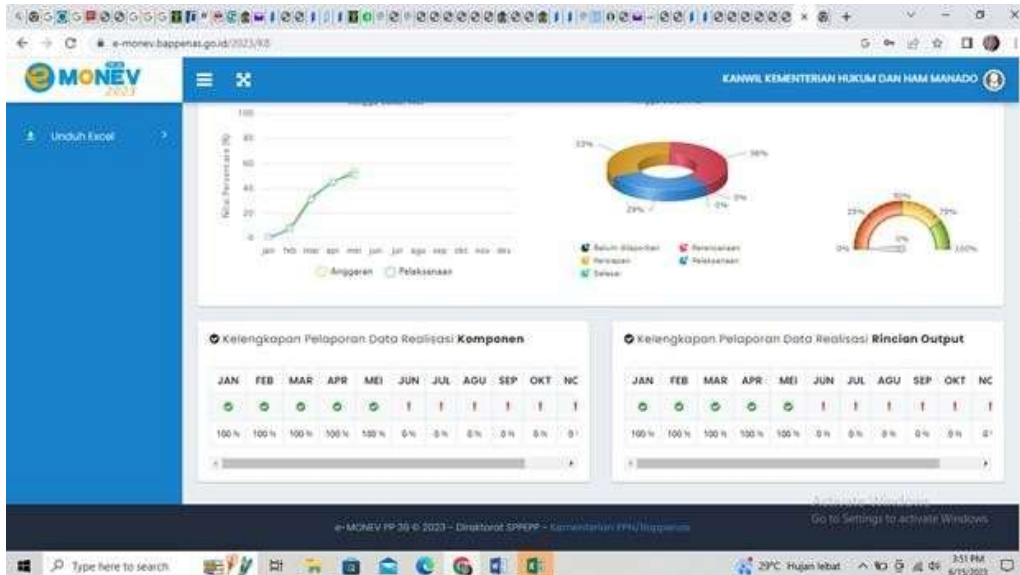


Gambar 7 Tangkapan Layar E-Monev Bappenas BPHN

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satker BPHN Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi

Utara telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

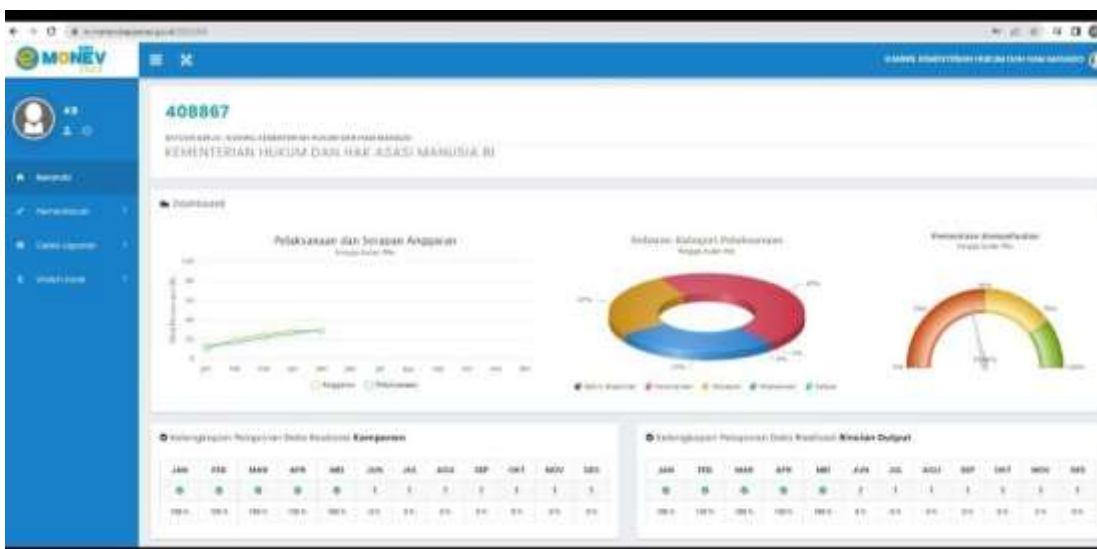
KANWIL - PEMASYARAKATAN



Gambar 8 Tangkapan Layar E-Mmoney Bappenas Pemasarakatan

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Money Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satuan Kerja Pemasarakatan telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

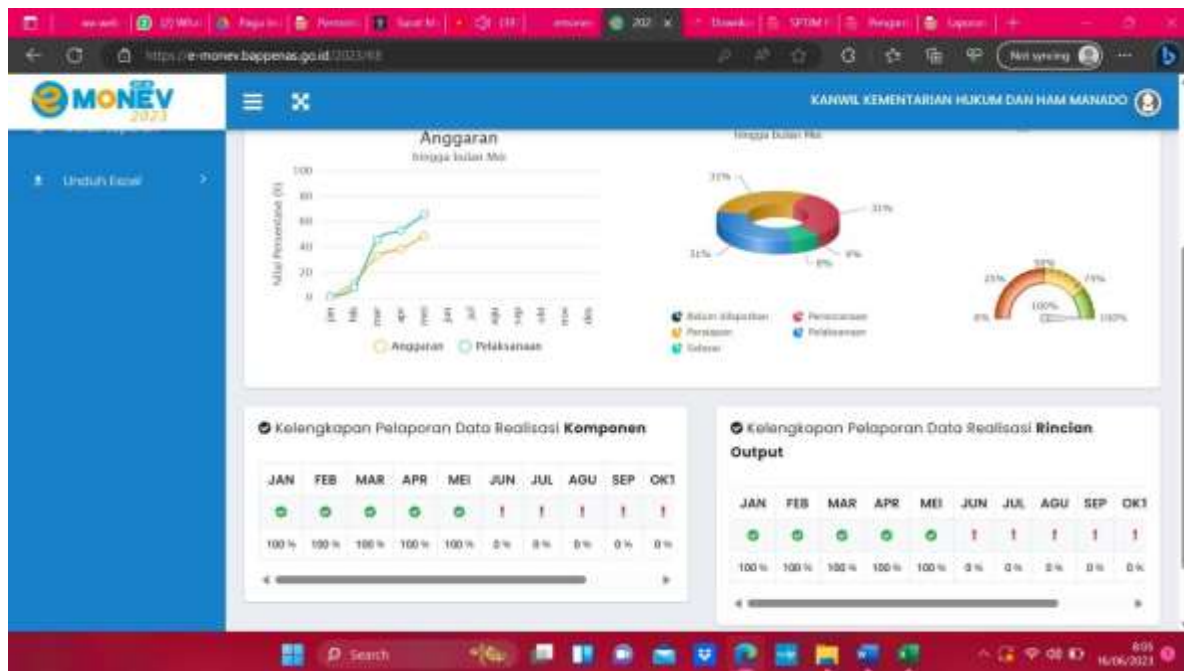
KANWIL – PP



Gambar 9 Tangkapan Layar E-Mmoney Bappenas PP

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satker Peraturan Perundang-undangan telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

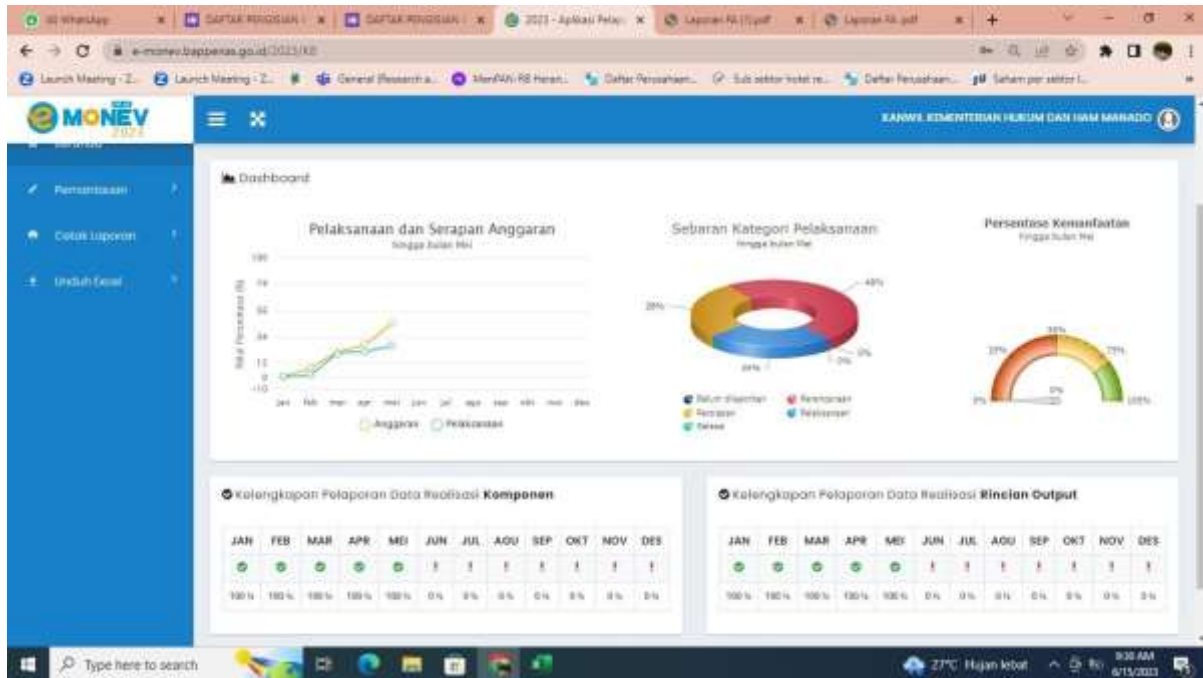
KANWIL – HAM



Gambar 10 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas HAM

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satker HAM telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

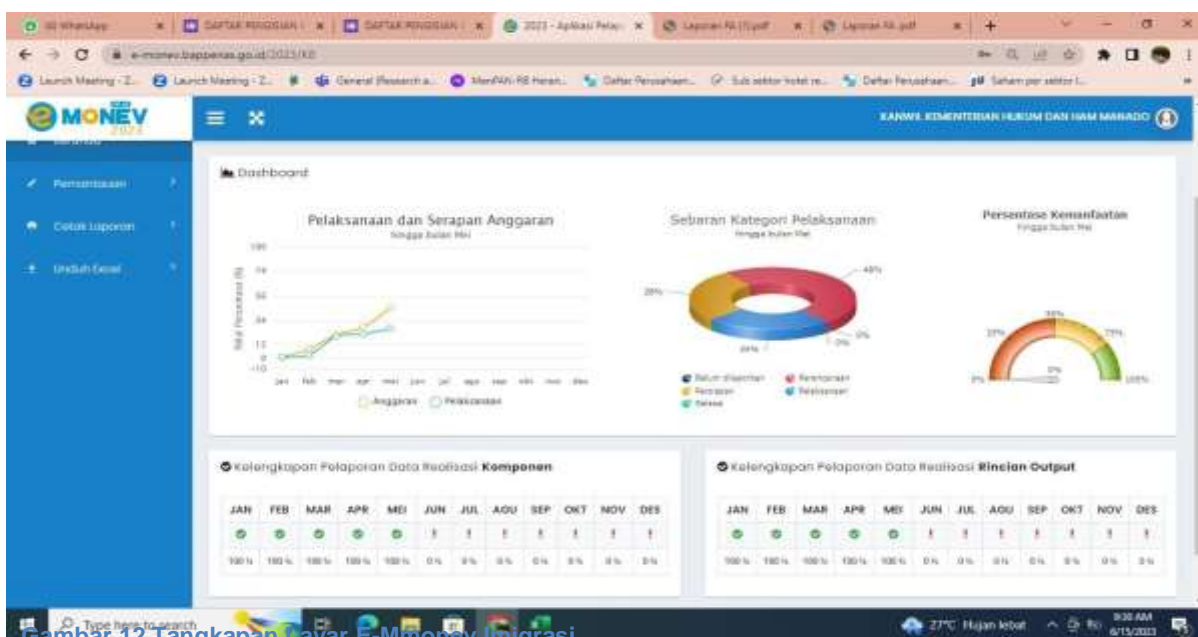
KANWIL – BPPHAM



Gambar 11 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas BPPHAM

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satker BPPHAM telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

KANWIL – IMIGRASI

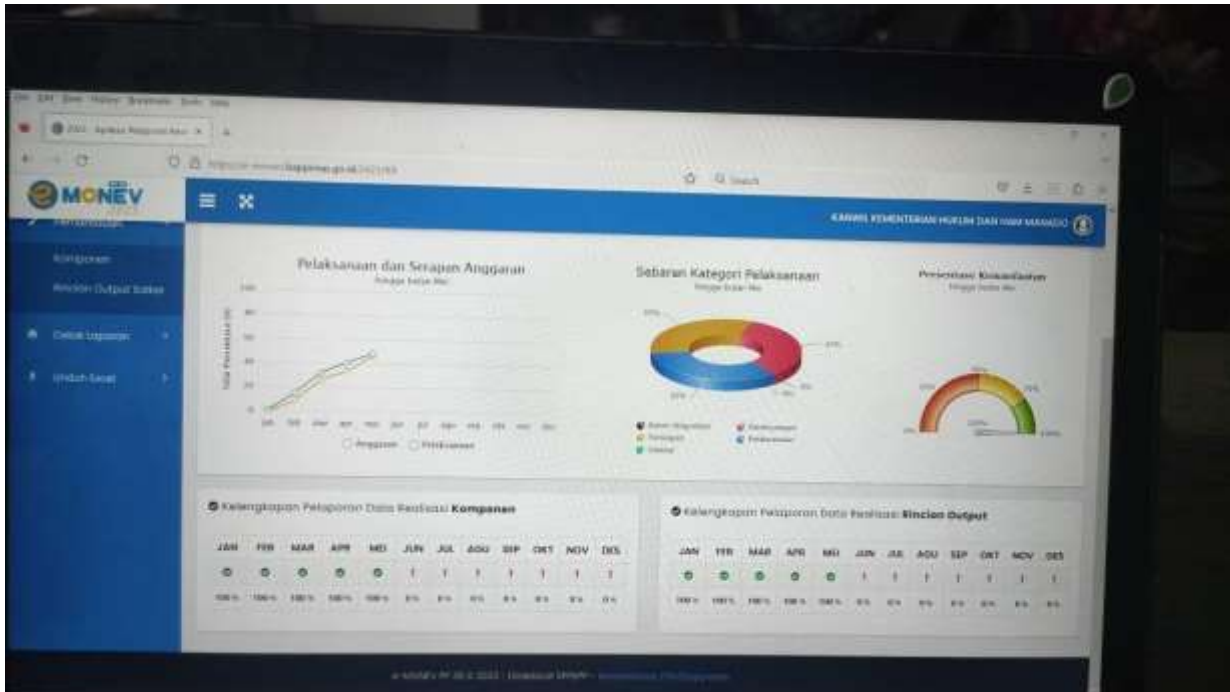


Gambar 12 Tangkapan Layar E-Mmonev Imigrasi

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satker Keimigrasian telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

KANWIL – AHU



Gambar 13 Tangkapan Layar E-Mmonev Bappenas AHU

Pada hasil tangkapan layar diatas pada Aplikasi E-Monev Bappenas satuan kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Satker Administrasi Hukum Umum telah menyampaikan pelaporan data realisasi Komponen dan Rincian Output Semester 1 Periode Januari s.d. Mei 100%.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara telah melaksanakan capaian kerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik, telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi serta target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, dengan kesimpulan sebagai berikut

- 1) Target Sasaran Kegiatan Tahun 2021 dalam dokumen Perjanjian Kinerja, dengan 22 (dua puluh dua) sasaran kegiatan dan 60 (enam puluh) indikator kinerja kegiatan;
- 2) Pada Semester I tahun 2023 ada 19 (sembilan belas) indikator kinerja kegiatan yang sudah mencapai target yang diberikan, 11 Indikator kinerja kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan direalisasikan pada semester II Tahun 2023, dan 30 Indikator Kinerja kegiatan yang belum ada progress dikarenakan sudah direncanakan pelaksanaannya pada Semester 2 Tahun 2023;
- 3) Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan yang belum dilaporkan pada LKjIP Semester I Tahun 2023 ini akan direalisasikan pada Semester II Tahun 2023;
- 4) Berdasarkan pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Tahun 2023 untuk 9 DIPA telah mencapai angka 50%;
- 5) Monitoring dan evaluasi terkait e-performance, nilai smart, e-monev bappenas, dan target kinerja dilaksanakan setiap bulannya dan dilaporkan secara triwulan dan semester pada unit eselon 1.

Saran

Berdasarkan simpulan dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dapat kami sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai bahan penyusunan strategi mencapai kinerja yang lebih baik di tahun berikutnya;
2. Diperlukan upaya peningkatan nilai SAKIP Kantor Wilayah melalui kegiatan pendampingan penyusunan LKjIP satuan kerja dan Kantor Wilayah oleh Unit Eselon I;
3. Perlunya pemahaman perhitungan nilai indikator kinerja kegiatan berdasarkan Kepmenkumham nomor M.HH-01.PR.01.01 Tahun 2021;
4. Dengan peningkatan volume pekerjaan dan demi tercapainya kinerja yang optimal, maka diperlukan penganggaran yang mencukupi pada tahun anggaran berikutnya; dan
5. Percepatan realisasi anggaran harus terus ditingkatkan sehingga target realisasi

anggaran tercapai dengan maksimal pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara Semester I Tahun 2023 kami buat, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ronald Lumbuun

NIP. 197809062003121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bsn.go.id/verifikasi>